



DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI

Jepang

ERNA KURNIAWATI
SRI ISSUNDARI
SRI HARJANTI

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI JEPANG

Erna Kurniawati

Sri Issundari

Sri Harjanti

Penerbit : LPPM UPN Veteran Yogyakarta 2024

Dinamika Politik Luar Negeri Jepang

Dinamika Politik Luar Negeri Jepang

Erna Kurniawati

Sri Issundari

Sri Harjanti

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Desain Sampul : Clarisa Shinta Cahyaningsih

Cetakan Pertama, November 2024 ISBN: 9786233893893

Dinamika Politik Luar Negeri Jepang

Diterbitkan oleh:

Penerbit LPPM UPN Veteran Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara),

Condongcatur , Yogyakarta, 55283 Telp.

(0274) 486188,486733, Fax. (0274) 486400

Dicetak Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara),

Condongcatur , Yogyakarta, 55283 Telp.

(0274) 486188,486733, Fax. (0274) 486400

KATA PENGANTAR

Buku *Dinamika Politik Luar Negeri Jepang* ini disusun untuk membantu kalangan akademik, Para Pembuat Keputusan maupun kalangan luas Peminat Studi Jepang dalam memahami isu-isu kontemporer terkait Politik Luar Negeri Jepang. Buku ini juga akan menambah Pustaka mengenai Politik Luar Negeri Jepang yang masih terbatas, terutama yang berpengantar Bahasa Indonesia.

Buku disusun terbagi 2 Bagian. Bagian Pertama terdiri dari 2 Bab, dimana Bab Pertama dimaksudkan untuk menjadi landasan pemahaman Pengambilan Keputusan Luar Negeri dengan beberapa model, yang kemudian diimplementasikan dalam model pembuatan keputusan luar negeri di Jepang. Untuk mendapat pemahaman komprehensif karakteristik Politik Luar Negeri Jepang terutama terkait Pertahanan, maka Bab Ke Dua berisi Pergeseran kebijakan Pertahanan Jepang dari karakteristik ekspansionis Ofensif ke karakteristik moderat Defensif.

Bagian II buku ini berisi Hubungan Bilateral Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Timur beserta Isu-Isu Kontemporer yang memberi dinamika kawasan. Bagian II terbagi dalam empat bab, dimana masing-masing Bab akan membahas hubungan bilateral Jepang terkait isu spesifik yang menjadi prioritas Pemerintah Jepang. Bab 3 berisi hubungan Jepang- Amerika Serikat dengan fokus pada aliansi dan tuntutan

burden sharing yang selama ini memberi dinamika tersendiri hubungan kedua negara.. Bab 4 berisi hubungan Bilateral Jepang-China terkait performa China dan persepsi China sebagai Ancaman bagi Jepang. Bab 5 berisi hubungan Jepang dengan dua Korea. sedangkan dengan Korea Selatan terkait *iugun ianfu* serta sengketa Pulau Takeshima (Dokdo), sedangkan dengan Korea Utara terutama terkait isu nuklir. Bab 6 sekaligus sebagai Bab Penutup, berisi hubungan bilateral Jepang - Rusia terkait persepsi Jepang terhadap Rusia dan *Northern territories* yang belum terselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, namun demikian, Penulis berharap buku ini dapat berkontribusi tidak hanya bagi kalangan akademik, terutama pemerhati Jepang, namun juga bagi para Pembuat Keputusan dan masyarakat luas peminat studi Jepang.

Selamat Membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAGIAN I : PENDAHULUAN.....	1
BAB I MODEL PEMBUATAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI DAN STUDI KASUS JEPANG.....	1
A. Model Aktor Rasional	2
B. Model Pengambilan Kebijakan dari Richard Snyder.....	7
C. Model Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Multidimensi dari James Rosenau.....	12
D. Model Pengambilan Kebijakan Sistemik dari Jacob G. Guvtavsson.....	16
E. Dinamika pengambilan kebijakan luar negeri Jepang	19
BAB II PERGESERAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DARI OFENSIF KE DEFENSIF.....	28
A. Fondasi Kebijakan Pertahanan Jepang era Meiji-Perang Dunia II.....	28
B. Kebijakan Pertahanan Jepang.....	30
BAGIAN II : Jepang dan Dinamika Kawasan: Perspektif Hubungan Bilateral Jepang.....	37
BAB III JEPANG DAN ALIANSI KEAMANAN JEPANG- AMERIKA SERIKAT.....	37
A. Awal Mula Hubungan Jepang-Amerika Serikat.....	37
B. Dinamika Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat	41
C. Masalah <i>Burden Sharing</i>	43

BAB IV JEPANG DAN PERSEPSI CHINA SEBAGAI ANCAMAN.....	49
A. Pendahuluan	49
B. Sejarah Hubungan China -Jepang era Sebelum Perang Dunia II	50
BAB V JEPANG DAN DUA KOREA	60
A. Sejarah Hubungan Jepang-Korea sebelum Perang Dunia II	60
B. Hubungan Jepang dan 2 Korea Pasca Perang Dunia II	62
BAB VI DINAMIKA HUBUNGAN JEPANG-RUSIA	67
A. Hubungan Jepang-Rusia sebelum Perang Dunia II.....	67
B. Hubungan Jepang-Rusia Pasca Perang Dunia II- sekarang...	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1. Model Pengambilan Kebijakan dari Richard Snyder	Error! Bookmark not defined.
Gambar I. 2. Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Multidimensi dari James Rosenau	Error! Bookmark not defined.
Gambar I. 3. Pengambilan Kebijakan Luar Negeri dari Jacob G. Gustavsson	Error! Bookmark not defined.
Gambar I. 4. Model Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Jepang	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 1. Peta Jepang dan Negara-Negara Sekitar.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 2. Tiga Pilar Utama dan Dua Paramater Lain ‘Yoshida Doctrine’ atau ‘Yoshida Line’	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 3. Bagan Perubahan Penamaan Pasukan Bela Diri Jepang	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 1. Treaty of Amity and Commerce between Japan and the United States, or "Harris Treaty", 29 July 1858.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 2. Prosentase GDP Anggaran Belanja Pertahanan Jepang	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 3. Pembagian Biaya Penempatan Pasukan Amerika Serikat di Jepang	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 4. Perbandingan Pasukan Militer Amerika Serikat yang Ditempatkan di Wilayah Jepang Dibandingkan di Negara Lain	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 5. Peringkat Anggaran Belanja Pertahanan 15 Besar Negara di Dunia (2022).....	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 6. Peringkat Populasi Dunia Tahun 2022	47
Gambar IV. 1. Peta Wilayah Perjanjian Shimonoseki.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 2. Letak Kepulauan Senkaku (Diaoyu) yang Masih Dipersengketakan.....	54

Gambar V. 1. Peta ketika Jepang Semakin Unggul dalam Perang Jepang-China dan Perang Jepang-Rusia**Error! Bookmark not defined.**

Gambar V. 2. Patung Iugun Ianfu yang Didirikan di Depan Konsulat Jenderal Jepang di Busan, Korea Selatan**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI. 1. Peta Letak Manchuria**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI. 2. Peta Northen Territories**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

MODEL PEMBUATAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI DAN STUDI KASUS JEPANG

Bagi sebuah negara, kepentingan nasional memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional mengacu pada prioritas serta tujuan utama sebuah negara. Sedangkan politik luar negeri mencakup rumusan kebijakan dalam mencapai kepentingan nasional yang sifatnya eksternal.

Politik luar negeri merujuk pada kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam kaitannya dengan negara lain serta aktor internasional lainnya. Politik luar negeri meliputi berbagai aktivitas, termasuk diplomasi, perjanjian internasional, strategi keamanan, dan tindakan ekonomi, yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional, melindungi kepentingan negara, dan mempengaruhi kondisi internasional. Politik luar negeri mencerminkan prioritas dan nilai-nilai suatu negara serta bagaimana negara tersebut menanggapi tantangan dan peluang di panggung global.

Jepang adalah salah satu negara di Kawasan Asia Timur yang mengalami perubahan yang sangat dinamis. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses pengambilan keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan di negara dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik dalam negeri, luar negeri,

maupun penyesuaian keduanya. Hasil dari respons terhadap beberapa faktor tersebut akan merefleksikan dinamika pengambilan kebijakan luar negeri Jepang dalam menangani berbagai isu.

Berikut di bawah akan dijelaskan beberapa perspektif yang menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Jepang. Penjelasan akan diawali dengan pendekatan-pendekatan yang utama proses pengambilan kebijakan luar negeri secara umum. Setelah itu kemudian akan diaplikasikan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang.

Ada banyak perspektif yang memfokuskan pada politik luar negeri sebuah negara. Mereka melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Berikut akan disampaikan beberapa pendekatan utama proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam kajian hubungan internasional.

A. Model Aktor Rasional

Model ini dikembangkan oleh Graham T Allison dalam bukunya berjudul “Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis” tahun 1999 (Allison, 1969). Konsep yang diajukan Allison menawarkan tiga model utama yaitu aktor rasional, perilaku organisasi dan politik birokrasi dengan mengambil kasus Krisis Misil Kuba (Cuban Missile Crisis) tahun 1962.

Pada model yang pertama yaitu *Aktor Rasional*, Allison menyampaikan beberapa asumsi dan karakteristik yang menjadi dasar model ini, yaitu: *pertama*, aktor pembuat kebijakan dianggap

rasional. Mereka membuat keputusan berdasarkan logika dan analisis yang sistematis. Para pembuat kebijakan dianggap mampu mengevaluasi berbagai opsi berdasarkan kriteria yang jelas dan menentukan tawaran yang paling sesuai dengan tujuan atau preferensi mereka. Mereka akan menentukan pilihan yang dianggap paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, berdasarkan penilaian obyektif dari kemungkinan hasil. Kedua, para pembuat kebijakan memiliki akses ke informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang rasional, meskipun dalam praktiknya, informasi ini sering kali tidak lengkap. Oleh karena itu mereka diharapkan memiliki akses ke informasi yang cukup dan relevan untuk membuat keputusan yang rasional. Dalam model ini, informasi diasumsikan sebagai salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi kualitas keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil bergantung pada kualitas dan kelengkapan informasi yang tersedia. Jika informasi tidak lengkap atau salah, maka keputusan yang diambil juga mungkin tidak optimal atau bahkan bisa bersifat menyesatkan. Ketiga, keputusan kadang-kadang didorong oleh kepentingan pribadi atau tujuan yang ingin diraih tanpa memperhitungkan faktor eksternal yang tidak relevan. Dalam model ini, kepentingan pribadi adalah faktor utama yang memotivasi keputusan, tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin tidak relevan bagi aktor. Dampaknya adalah keputusan akan lebih terfokus pada pencapaian tujuan atau kepentingan pribadi dari aktor. Bisa jadi keputusan tersebut

pengabaian terhadap pertimbangan atau dampak eksternal yang tidak langsung mempengaruhi hasil bagi aktor tersebut.

Model kedua dari Allison adalah Model *Organisasi* yang memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana keputusan dibuat di dalam organisasi. Pada model ini keputusan diambil berdasarkan cara-cara operasional yang telah terstruktur dalam organisasi serta hasil dari kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Keputusan sering kali berasal dari kompromi berbagai prosedur dan kebijakan yang telah ada terutama dalam konteks pemerintahan dan lembaga besar berdasarkan: *pertama*, rutinitas dan prosedur yang memfokuskan bahwa banyak keputusan diambil berdasar rutinitas yang telah mapan dan prosedur standar yang telah ada dalam organisasi. Keputusan kadang kala bukan hasil dari analisis situasi secara mendalam atau pemikiran strategis baru, melainkan hasil dari mengikuti pola yang sudah ada. Misalnya, jika suatu organisasi telah memiliki prosedur standar untuk menangani situasi tertentu, maka mereka akan cenderung mengikuti prosedur tersebut daripada membuat keputusan dari awal. *Kedua*, organisasi cenderung mengandalkan cara-cara operasional yang telah terbukti telah mapan di masa lalu. Situasi ini meliputi metode, teknik, atau strategi yang telah diterapkan sebelumnya dan terbukti berhasil. Pada saat menghadapi situasi atau tantangan baru, organisasi sering kali menyesuaikan atau menerapkan cara-cara ini dibandingkan merancang solusi yang sepenuhnya baru serta *ketiga*, keputusan sering kali adalah hasil dari kompromi antara berbagai prosedur dan

kebijakan yang ada dalam organisasi. Dalam banyak kasus, berbagai bagian dari organisasi mungkin memiliki prioritas dan prosedur yang berbeda, sehingga keputusan akhir mungkin merupakan hasil dari negosiasi dan penyesuaian antara berbagai kepentingan internal. Misalnya, dalam pemerintahan, keputusan kebijakan bisa melibatkan berbagai kementerian atau lembaga dengan kepentingan dan prosedur yang berbeda, sehingga keputusan akhir sering kali merupakan hasil dari kompromi antara semua pihak yang terlibat.

Model yang ketiga dari Allison adalah *Politik Birokrasi*. Model ini menganggap bahwa keputusan adalah hasil dari proses politik di mana berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda saling bernegosiasi dan berkompromi. Faktor-faktor seperti kekuatan politik, hubungan kekuasaan, dan pertimbangan politik internal berperan besar dalam pembentukan keputusan. Adapun perinciannya adalah: pertama, dalam model ini, keputusan merupakan hasil dari negosiasi antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda, bukan hanya diambil oleh satu individu atau entitas. Setiap aktor seperti pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, partai politik, atau lobi memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Keputusan akhir sering kali merupakan hasil dari kompromi antara kepentingan-kepentingan ini. Proses negosiasi ini bisa melibatkan tawar-menawar, penyesuaian, dan penyusunan strategi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. *Kedua*, faktor-faktor seperti kekuatan politik dan hubungan kekuasaan memainkan peran penting dalam pengambilan

keputusan. Aktor yang mempunyai kekuatan politik atau dukungan yang lebih kuat dapat menentukan arah serta hasil keputusan lebih besar dibandingkan dengan aktor yang kurang berkuasa. Hubungan di antara berbagai aktor baik berupa persekutuan politik dan aliansi, dapat menentukan bagaimana keputusan diambil serta bagaimana kompromi dicapai. *Ketiga*, keputusan sering kali ditentukan oleh pertimbangan politik internal, misalnya kebutuhan untuk menjaga dukungan dari konstituen, mengatasi tekanan dari partai politik, atau mempertahankan stabilitas politik dalam organisasi atau pemerintahan. Pertimbangan ini mempengaruhi prioritas yang ditujukan kepada isu tertentu serta cara keputusan diambil. Contohnya, seorang pemimpin politik kadang kala perlu membuat keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan mendatang.

Ketiga model ini yang ditawarkan oleh Allison memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana keputusan dibuat. Masing-masing model mengusulkan cara pandang yang menarik dan unik dalam dinamika pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan organisasi. Ketiga mode tersebut digunakan oleh Allison untuk menganalisis krisis misil Kuba tahun 1962 dan menunjukkan bagaimana masing-masing model dapat membantu menjelaskan berbagai aspek dari peristiwa tersebut.

B. Model Pengambilan Kebijakan dari Richard Snyder

Richard Snyder merupakan salah satu tokoh penting dalam kajian kebijakan luar negeri. Tulisannya berjudul "Decision-Making in Foreign Policy: An Approach to the Study of International Politics" tahun 1964 (Snyder et al., 2002). Karyanya tersebut difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana keputusan kebijakan luar negeri diambil dengan penekanan pada aktor dan faktor yang berinteraksi. Model ini memfokuskan bahwa keputusan kebijakan luar negeri diambil melalui proses yang melibatkan banyak aktor dan langkah-langkah antara lain:

Pertama, dalam tulisannya Snyder mengembangkan model yang dikenal sebagai Model *Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Luar Negeri*. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, formulasi alternatif kebijakan, dan evaluasi pilihan sebelum keputusan akhir diambil. Model ini juga mengakui peran signifikan dari struktur birokrasi serta interaksi antar aktor di dalam proses pengambilan keputusan. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya merumuskan berbagai opsi kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Situasi ini melibatkan berbagai kemungkinan tindakan atau strategi yang bisa diaplikasikan. Setiap opsi kebijakan akan dievaluasi berdasarkan kriteria mencakup efisiensi, biaya, dampak potensial, serta risiko. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mana dari alternatif tersebut yang paling cocok untuk diterapkan.

Kedua, dalam tulisannya, Snyder menekankan bahwa keputusan kebijakan luar negeri kadang kala dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan organisasi. Selain itu, model ini menekankan pentingnya interaksi antar aktor dalam proses pengambilan keputusan. Birokrasi, dengan rutinitas dan prosedur internalnya, dapat membatasi atau memfasilitasi keputusan. Kondisi ini meliputi peran berbagai individu dan kelompok, seperti pembuat kebijakan, diplomat, dan pejabat pemerintahan lain, serta bagaimana mereka bekerja sama atau berkonflik dalam merumuskan kebijakan. Faktor seperti kebijakan standar, rutinitas birokrasi, dan interaksi antar departemen memainkan peran penting dalam bagaimana keputusan diambil dan diterapkan. Misalnya, keputusan untuk menerapkan sanksi ekonomi bisa dipengaruhi oleh proses birokrasi di departemen luar negeri dan perdagangan.

Ketiga, menurut Snyder, individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan—terutama pemimpin politik dan pembuat kebijakan—memiliki peran penting dalam membentuk keputusan akhir. Cara seorang pemimpin melihat serta menilai ancaman atau risiko sangat ditentukan oleh pengalaman pribadi dan ideologi mereka. Misalnya, seorang pemimpin yang pernah mengalami situasi konflik militer, biasanya lebih sensitif terhadap ancaman yang diasumsikannya mirip dengan situasi tersebut. Persepsi, keyakinan, dan pengalaman pribadi dari pemimpin dapat mempengaruhi bagaimana mereka menilai ancaman serta peluang dan bagaimana mereka menentukan di antara berbagai alternatif

kebijakan. Ini berarti bahwa faktor psikologis dan kognitif dari para pembuat keputusan mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Faktor psikologis dan kognitif, seperti bias, pandangan dunia, dan kecenderungan kognitif, dapat mempengaruhi bagaimana pemimpin membuat keputusan. Bagaimana mereka memproses informasi dan bagaimana bias pribadi atau pandangan dunia mereka mempengaruhi pilihan kebijakan.

Keempat, Snyder juga mengidentifikasi pentingnya faktor internal dan eksternal dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Faktor internal meliputi kepentingan nasional, tekanan politik domestik, dan preferensi pembuat keputusan, sementara faktor eksternal mencakup tekanan internasional, hubungan dengan negara lain, dan dinamika global. Kepentingan nasional mengacu pada tujuan dan prioritas strategis suatu negara yang biasanya berkaitan dengan keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan. Tekanan politik domestik meliputi berbagai faktor seperti opini publik, tekanan dari kelompok kepentingan, dan dinamika politik internal. Pembuat keputusan sering kali harus mempertimbangkan tekanan politik domestik agar kebijakan luar negeri mereka mendapat dukungan publik dan tetap konsisten dengan kepentingan politik dalam negeri. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan untuk mencerminkan kebutuhan dan harapan domestik. Preferensi pembuat keputusan dapat membentuk arah kebijakan luar negeri yang mungkin berbeda dari kebijakan yang didasarkan semata-mata pada kepentingan nasional. Kepentingan ini memandu pembuatan

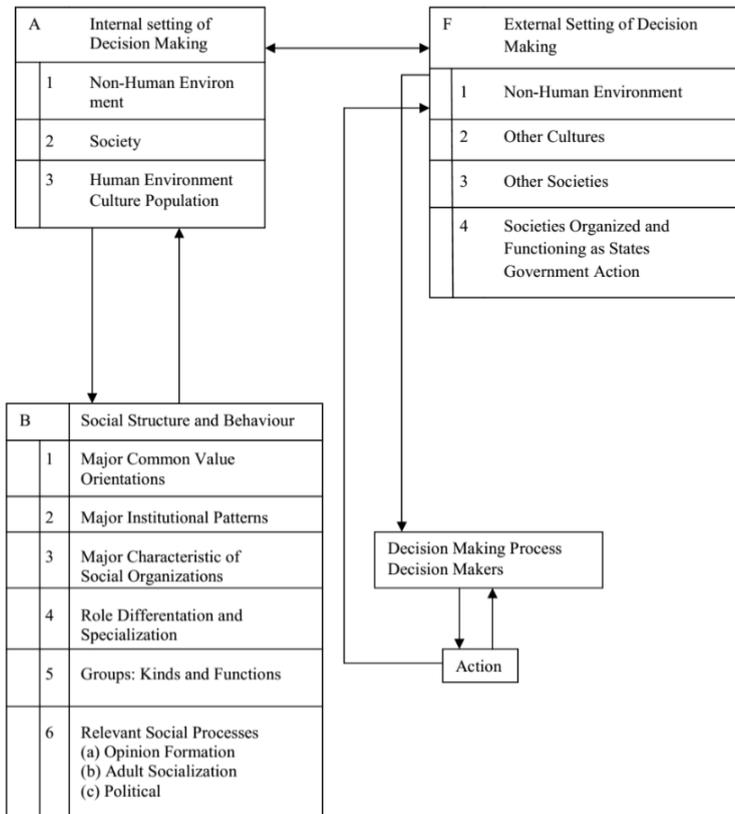
kebijakan luar negeri untuk melindungi dan mempromosikan manfaat nasional.

Dalam modelnya, Snyder mengakui bahwa keputusan kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor ini, yang mempengaruhi bagaimana negara merespons isu-isu internasional dan merumuskan kebijakan mereka. Sedangkan Tekanan internasional mencakup pengaruh dari negara lain, organisasi internasional, dan komunitas global. Ini meliputi sanksi, aliansi, dan diplomasi internasional yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Tekanan internasional dapat membatasi atau mendorong kebijakan tertentu. Negara mungkin harus menanggapi tekanan atau tuntutan dari negara lain atau organisasi internasional yang mempengaruhi arah kebijakan mereka. Hubungan bilateral atau multilateral dengan negara lain mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Hubungan ini dapat melibatkan kerja sama, persaingan, atau konflik yang mempengaruhi bagaimana negara merumuskan kebijakan luar negeri. Negara harus menyeimbangkan kebijakan luar negeri mereka berdasarkan hubungan yang ada dengan negara lain.

Keputusan untuk menjalin aliansi atau menghadapi konflik sering kali dipengaruhi oleh hubungan negara dengan mitra internasionalnya. Dinamika global meliputi perubahan besar dalam sistem internasional seperti perubahan kekuatan global, perubahan teknologi, dan perubahan dalam norma-norma internasional. Perubahan dalam dinamika global dapat mempengaruhi keputusan

kebijakan luar negeri dengan menciptakan peluang atau ancaman baru. Negara harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk mengatasi perubahan dalam sistem internasional.

Gambar I.1. Model Pengambilan Kebijakan dari Richard Snyder



Sumber: (Snyder et al., 2002)

Secara keseluruhan, faktor internal dan eksternal dalam pengambilan kebijakan luar negeri menurut Snyder menunjukkan bahwa keputusan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal seperti tekanan internasional dan hubungan dengan negara lain, tetapi juga oleh faktor internal seperti kepentingan nasional, tekanan politik domestik, dan preferensi individu. Keputusan kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi kompleks antara kedua jenis faktor ini, yang mempengaruhi bagaimana negara merespons isu-isu internasional dan merumuskan kebijakan mereka.

C. Model Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Multidimensi dari James Rosenau

James Rosenau adalah akademisi berkontribusi signifikan dalam studi hubungan internasional, terutama dalam teori pengambilan kebijakan luar negeri berjudul “Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods.” tahun 1974 (Rosenau, 1974). Model pengambilan kebijakan luar negeri Rosenau yang dikenal dengan pendekatan Model *Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Multidimensi*. Model ini fokus pada pentingnya beragam faktor yang mempengaruhi bagaimana keputusan kebijakan luar negeri. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai model pengambilan kebijakan luar negeri Rosenau:

1. Rosenau mengembangkan pendekatan yang melihat bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sangat kompleks dan multidimensi. Dia menyampaikan bahwa keputusan kebijakan luar negeri tidak diambil dalam situasi vakum, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi serta lapisan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri menurut Rosenau mencakup: *Faktor Internal* yang berasal dari situasi domestik negara. Faktor tersebut mencakup struktur pemerintahan berupa struktur organisasi dan birokrasi pemerintahan. Mereka mempengaruhi bagaimana keputusan diambil. Contohnya, sistem pemerintahan yang terpusat atau terdesentralisasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Di samping itu juga persepsi serta kebutuhan pemimpin seperti persepsi dan kepentingan pribadi para pemimpin serta kebutuhan internal suatu negara memainkan peran penting. Dengan demikian, keputusan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik pemimpin atau tekanan dari kelompok dalam negeri. Faktor berikutnya adalah *Faktor Eksternal* berupa lingkungan Internasional yang meliputi kondisi dan dinamika di tingkat internasional, seperti hubungan antara negara atau perubahan dalam sistem internasional, dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Hubungan antar negara berupa baik hubungan bilateral atau multilateral juga berperan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
3. Rosenau mengembangkan beberapa model yang menggambarkan bagaimana keputusan kebijakan luar negeri dapat diambil, termasuk Model *Rasional* dimana keputusan ditentukan setelah mempertimbangkan semua informasi yang relevan dan menganalisis berbagai opsi berdasarkan

logika serta perhitungan sistematis. Misalnya keputusan untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas dilakukan setelah melakukan analisa mendalam tentang manfaat dan kerugian yang terkait. Model *Non-Rasional* menggambarkan bahwa keputusan dapat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor non-rasional seperti emosi, persepsi pribadi, atau tekanan internal dan eksternal yang tidak sepenuhnya rasional. Misalnya keputusan untuk intervensi militer ditentukan berdasar keyakinan ideologis atau emosional, meskipun analisis rasional menunjukkan risiko yang tinggi.

4. Model *Integratif* yang digambarkan oleh dengan cara menggabungkan berbagai aspek dari model rasional serta non-rasional dalam rangka memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan. Model ini meyakini bahwa keputusan kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal serta elemen rasional dan non-rasional.
5. Proses pengambilan keputusan dibagi atas beberapa dimensi yaitu Dimensi Sistem Internasional yang memperhitungkan bagaimana posisi dan peran negara dalam sistem internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri. Misalnya, status negara sebagai kekuatan besar atau kekuatan kecil dapat mempengaruhi strategi luar negeri mereka. Selain itu dimensi negara-negara yang mengkaji

faktor-faktor spesifik negara, baik kepentingan nasional, tekanan domestik, dan struktur politik yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Selain itu juga Dimensi Individu yang memperhatikan peran individu dalam pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya pandangan, preferensi, dan kepribadian para pemimpin. Terakhir Dimensi Interaksi Internasional yang mempertimbangkan bagaimana interaksi antara negara-negara, aliansi, dan organisasi internasional mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri.

Gambar I.2. Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Multidimensi dari James Rosenau

Systemic aggregation continuum	Time continuum Sources that tend to change slowly	Sources that tend to undergo rapid change
Systemic sources	<p>Great power structure Alliances</p> <p>Size Geography</p>	<p>Situational factors: external Issues Areas Crisis</p>
<p>Societal sources</p> <p>Governmental sources</p> <p>Idiosyncratic sources</p>	<p>Economic Development</p> <p>Culture and history</p> <p>Social structure Moods of Opinion Political accountability Governmental structure</p>	<p>Situational factors: internal</p> <p>Values, talents experiences and personalities of leaders</p>

Sumber: James N. Rosenau (1976)

Gambar di atas adalah Model *Pengambilan Kebijakan Luar Negeri* Rosenau memberikan kerangka kerja yang kompleks dan multidimensi untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan luar negeri diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, serta elemen rasional dan non-rasional, model ini menawarkan pandangan yang lengkap mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat internasional.

D. Model Pengambilan Kebijakan Sistemik dari Jacob G. Guvtavsson

Jacob G. Gustavsson adalah seorang akademisi dalam studi hubungan internasional yang memberikan kontribusi penting terhadap analisis kebijakan luar negeri berjudul "The Politics of International Relations: An Introduction to the Study of International Relations" tahun 1995. Karya Gustavsson berfokus pada pendekatan sistemik dan teori dalam analisis kebijakan luar negeri dalam bukunya yang berjudul "The Politics of International Relations: An Introduction to the Study of International Relations" (1995). Dalam bukunya Gustavsson mengusulkan model dan konsep kunci yang menekankan pada pendekatan sistemik yang mengevaluasi kebijakan luar negeri dalam konteks struktur dan dinamika sistem internasional secara keseluruhan. Pendekatan ini mengakui keputusan kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh faktor internal negara tetapi juga oleh posisi serta hubungan negara tersebut dalam sistem internasional. Beberapa Konsep utama dalam

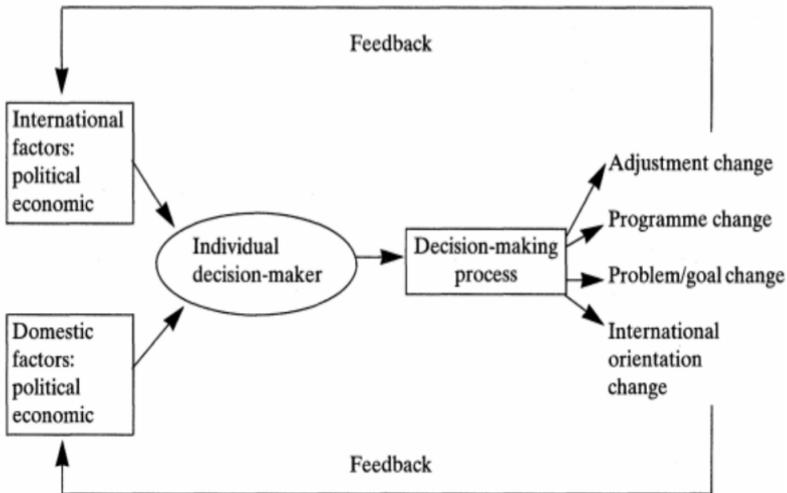
Pendekatan Sistemik antara lain: *pertama*, Struktur dan Sistem Internasional, termasuk distribusi kekuatan serta hubungan antara negara-negara besar, menentukan keputusan kebijakan luar negeri. Contohnya, dalam konteks bipolaritas selama Perang Dingin, keputusan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. *Kedua*, Dinamika Kekuatan Global yang menggambarkan perubahan dalam distribusi kekuatan global, seperti munculnya kekuatan baru atau perubahan dalam kekuatan negara-negara besar, akan menentukan kebijakan luar negeri. Negara-negara akan menyesuaikan kebijakan mereka merespons perubahan tersebut. *Ketiga*, Organisasi internasional (misalnya, PBB) dan aktor non-negara (misalnya, LSM, perusahaan multinasional) juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dengan cara yang beragam. Pengaruh tersebut antara lain dari pembentukan norma internasional hingga tekanan ekonomi dan diplomatik.

Dalam perspektif ini Guvtavsson mengidentifikasi beberapa model untuk mengevaluasi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Model-model ini menggabungkan elemen dari berbagai pendekatan teori, termasuk faktor-faktor internal, eksternal, dan sistemik. Model tersebut antara lain: *Pertama*, Model *Rasional-Instrumen* yang berasumsi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri merupakan hasil dari analisis rasional di mana aktor kebijakan menganalisa berbagai opsi berdasarkan logika serta tujuan strategis. Keputusan akan diambil dengan memperhitungkan keuntungan serta kerugian setiap opsi. *Kedua*, Model *Organisasi* memfokuskan pada

pentingnya struktur organisasi serta proses birokrasi dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan-kebijakan luar negeri ditentukan oleh prosedur serta rutinitas internal dari lembaga-lembaga pemerintah, dan interaksi antar departemen dan agen. *Ketiga*, Model *Psikologis* yang memperhitungkan bagaimana faktor psikologis, termasuk persepsi, keyakinan, dan bias individu para pembuat kebijakan akan mempengaruhi kebijakan. Faktor-faktor emosional dan kognitif bisa memengaruhi bagaimana informasi diproses dan keputusan diambil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri menurut Gustavsson antara lain faktor internal berupa kepentingan serta kebutuhan nasional akan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Elemen-elemen seperti keamanan, ekonomi, dan ideologi juga mempunyai peran penting. Selanjutnya adalah persepsi pemimpin dan elite politik dalam bentuk pandangan dan preferensi pemimpin dapat mempengaruhi kebijakan. Kedua adalah faktor eksternal berupa struktur dan dinamika sistem internasional, termasuk kekuatan global dan hubungan antar negara akan mempengaruhi kebijakan negara. Di samping itu, hubungan bilateral dan multilateral berupa interaksi dengan negara lain dan organisasi internasional juga menjadi pertimbangan kebijakan luar negeri.

Gambar I.3. Pengambilan Kebijakan Luar Negeri dari Jacob G. Gustavsson



Sumber: (Gustavsson, 1999)

Jacob Gustavsson memberikan kontribusi signifikan dalam mengevaluasi kebijakan luar negeri melalui pendekatan sistemik yang memfokuskan pentingnya faktor internal, eksternal, dan sistemik. Model-model yang dia kembangkan, termasuk model rasional-instrumen, organisasi, dan psikologis, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keputusan kebijakan luar negeri diambil dan didasarkan oleh berbagai faktor.

E. Dinamika pengambilan kebijakan luar negeri Jepang

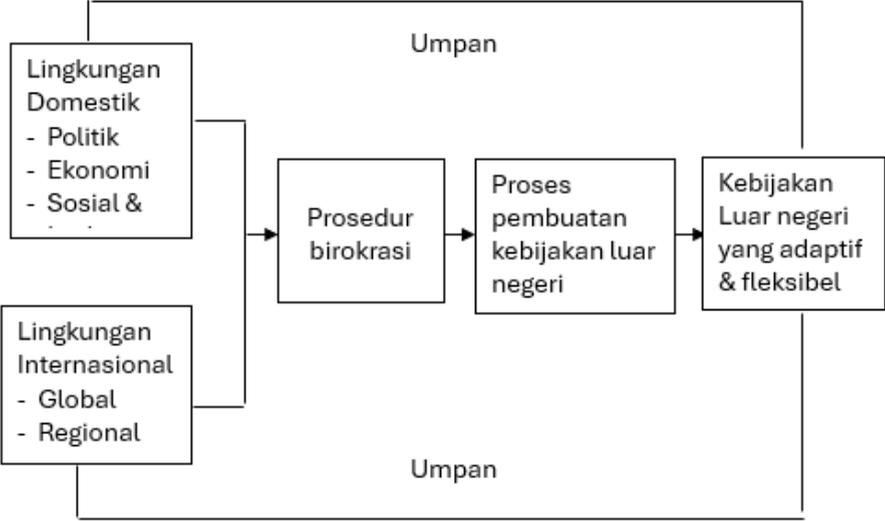
Jepang adalah salah satu negara berpengaruh di Kawasan Asia Timur. Peran Jepang sangat menonjol baik dalam konteks

global maupun regional. Di tingkat global Jepang merupakan salah satu negara yang berhasil dalam mengembangkan teknologi dan Inovasi (Wiedarti, 1992). Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Sony, Toyota, dan Panasonic memiliki dampak besar di pasar global. Jepang juga terkenal dalam inovasi teknologi seperti robotika, elektronik konsumen, dan otomotif. Di tingkat regional, Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia-Pasifik. Negara ini memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara di kawasan tersebut (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Jepang sering menjadi mitra perdagangan utama dan investor besar di negara-negara Asia, serta berperan penting dalam rantai pasokan regional.

Keberhasilan yang dicapai oleh Jepang tersebut tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang diambil oleh para pembuat keputusan luar negeri dalam rangka menentukan arah serta orientasi kebijakan luar negeri Jepang. Dalam melihat proses pengambilan kebijakan luar negeri Jepang maka pengambilan keputusan tersebut adalah hasil dari proses yang melibatkan analisis rasional (Allison & Zelikow, 1999) dengan didasarkan pada kepentingan strategis dan ekonomi nasionalnya. Jepang juga kadang kala perlu melakukan penyesuaian terhadap prosedur birokrasi yang telah ada (Allison, 1969). melalui adaptasi atas respons berbagai aktor politik, birokrasi, dan kepentingan kelompok. Selain itu pertimbangan faktor politik domestik (Guvstavsson, 1999; Rosenau, 1974; Snyder et al., 2002) seperti opini publik, dan respons media massa menjadi salah satu

perhitungan, serta adaptasi terhadap perubahan dinamika internasional (Guvtavsson, 1999; Rosenau, 1974; Snyder et al., 2002) baik di bidang ekonomi, politik dan keamanan yang terjadi di tingkat regional dan global. Dengan pendekatan yang komprehensif dan fleksibel, Jepang terus berusaha untuk memainkan peran yang konstruktif di tingkat global dan regional, sambil beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang muncul.

Gambar I.4. Model Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Jepang



Sumber: menyesuaikan dari beberapa sumber

Sebagai salah satu negara yang berpengaruh di wilayah Asia dan global, eksistensi Jepang tidak bisa dilepaskan dari peran strategisnya dalam politik internasional, ekonomi global, dan keamanan regional. Dalam bidang ekonomi, kekuatan Jepang

terletak pada basis industri yang luas dan kemajuan teknologinya yang inovatif. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China (Buchholz, 2024), Jepang memiliki posisi yang penting dalam suplai kebutuhan pokok global, perdagangan internasional, dan investasi.

Di tingkat regional, Jepang memainkan peran kunci dalam stabilitas dan pertumbuhan Asia Timur. Melalui berbagai inisiatif ekonomi dan diplomatik, Jepang berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, meningkatkan hubungan perdagangan, dan mempromosikan integrasi ekonomi di kawasan tersebut (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Jepang merupakan anggota aktif dalam forum regional seperti ASEAN+3 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang berfungsi sebagai platform untuk kerja sama ekonomi dan dialog antar negara. Dengan kekuatan ekonomi yang signifikan dan kekuatan teknologinya yang maju, Jepang memainkan peran penting dalam membentuk dinamika regional dan global (<https://www.id.emb-japan.go.jp>, n.d.).

Sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China, Jepang memiliki pengaruh yang besar dalam perdagangan internasional, investasi, dan inovasi teknologi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Dengan pengaruh yang dimiliki, Jepang dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan global dan mempengaruhi tren ekonomi serta teknologi. Kekuatan ekonominya memungkinkan

Jepang untuk menjadi pemimpin dalam berbagai sektor industri, dari otomotif hingga elektronik, serta berkontribusi pada pengembangan standar internasional dan teknologi mutakhir. Hubungannya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (Bergsten, 1998) dan China (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2024), serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok G7, memperkuat posisinya sebagai aktor kunci di panggung dunia. Hubungan Jepang dan AS menempatkan Jepang dalam posisi strategis untuk mempengaruhi kebijakan keamanan regional dan global. Aliansi keamanan dengan Amerika Serikat memberikan jaminan pertahanan dan memperkuat kapasitas Jepang dalam menghadapi ancaman di kawasan Asia-Pasifik, termasuk isu-isu terkait Korea Utara dan dinamika regional lainnya (Hoff, n.d.).

Hubungannya dengan China, sebagai mitra dagang utama, mencerminkan kompleksitas dalam dinamika regional (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2024). Jepang berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kerja sama ekonomi yang erat dengan China serta mengelola ketegangan yang mungkin timbul dari perbedaan politik dan keamanan. Meskipun ada persaingan dalam beberapa aspek, Jepang dan China tetap terhubung secara ekonomi, dengan Jepang memainkan peran penting dalam investasi dan perdagangan di pasar China yang berkembang pesat.

Keterlibatannya dengan PBB (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023c) dan kelompok G7 (Ministry of Foreign Affairs of

Japan, 2023b) menunjukkan bahwa Jepang berkomitmen untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah global dan pengembangan kebijakan internasional. Dalam menghadapi situasi konflik di beberapa wilayah seperti Timor Leste, Sahara Barat, Bosnia dan konflik internasional lain, Jepang turut berpartisipasi mendukung tercapainya perdamaian di kawasan tersebut (Ministry of Foreign Affairs of Japan, n.d.-b). Sebagai anggota aktif dalam organisasi-organisasi PBB (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2023a), Jepang berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas global, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui partisipasinya, Jepang tidak hanya memperkuat posisinya sebagai negara yang berpengaruh, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola global dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat global.

Jepang juga memiliki sejarah panjang dalam kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan global melalui kebijakan bantuan pembangunan luar negeri atau *Official Development Assistance* (ODA) dan partisipasi aktif dalam misi perdamaian internasional (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1997). Melalui ODA, Jepang menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk membantu dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan mitigasi bencana. ODA Jepang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama internasional. Program-program ODA

Jepang dirancang untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi di negara-negara penerima bantuan, yang pada gilirannya berkontribusi pada keamanan global dan kesejahteraan masyarakat internasional.

Dalam hal inisiatif seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), Jepang berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan perdagangan bebas di kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan salah satu wilayah strategis paling penting di dunia. FOIP adalah kebijakan yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi, keterbukaan ekonomi, dan tata kelola yang transparan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, n.d.-a). Jepang menggunakan FOIP untuk mempromosikan kerja sama regional dan global, termasuk penguatan aliansi dengan negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya.

Langkah yang dilakukan Jepang dalam rangka mencapai tujuan FOIP mencakup berbagai inisiatif konkret seperti meningkatkan kehadiran militer di kawasan, memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara regional, serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur maritim dan konektivitas di Indo-Pasifik. Jepang juga menggalang dukungan internasional untuk prinsip-prinsip FOIP dan bekerja sama dengan negara-negara mitra dalam rangka menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim, ancaman terorisme, dan pengelolaan sumber daya laut.

Sebuah langkah yang mencerminkan komitmennya terhadap keamanan regional dan kesejahteraan global, FOIP tidak hanya

memperkuat posisi Jepang sebagai aktor utama di kawasan tetapi juga memperlihatkan dedikasinya untuk mempromosikan tata kelola global yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, Jepang berusaha memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap sebagai wilayah yang aman, stabil, dan terbuka untuk semua negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi kerja sama internasional yang konstruktif.

Di sisi lain, Jepang menghadapi tantangan besar dari perubahan geopolitik, termasuk meningkatnya pengaruh China di kawasan Asia Timur dan ketegangan terkait dengan masalah keamanan seperti program nuklir Korea Utara (Ministry of Foreign Affairs of Japan, n.d.-c). Untuk menghadapi tantangan ini, Jepang mengandalkan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat serta strategi diplomasi yang cermat untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Dengan pendekatan strategis dan kebijakan luar negeri yang berfokus pada kerja sama internasional, stabilitas regional, dan inovasi, Jepang terus memainkan peran vital dalam membentuk masa depan global. Melalui kontribusinya dalam bantuan pembangunan, inisiatif seperti *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), serta aliansi strategis dengan negara-negara besar, Jepang tidak hanya memperkuat posisinya sebagai kekuatan global tetapi juga mendemonstrasikan komitmennya terhadap keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Sebagai aktor kunci di panggung internasional, Jepang berkomitmen untuk menghadapi

tantangan global dengan kebijakan yang adaptif dan inklusif, mendukung tata kelola global yang lebih baik dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat di seluruh dunia.

BAB II

PERGESERAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DARI OFENSIF KE DEFENSIF

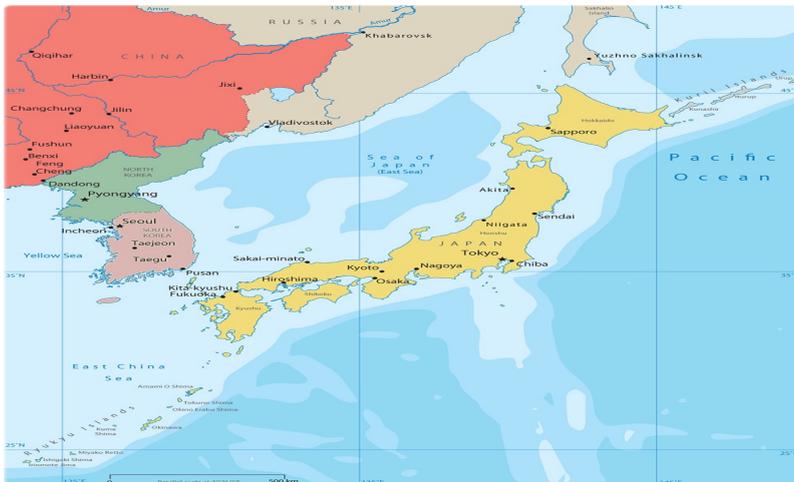
A. Fondasi Kebijakan Pertahanan Jepang era Meiji-Perang Dunia II

Sebelum era Perang Dunia II, Jepang sudah dikenal sebagai negara militeristik yang agresif. Pada era Perang Dunia II (1939-1945) di bawah kepemimpinan Kaisar Hirohito (Kaisar Showa), Jepang berambisi membentuk *The Greater East Asia co Prosperity Sphere* (GEACPS). Konsep GEACPS adalah ingin membentuk Blok Asia dibawah kepemimpinan Jepang dengan slogan "Asia for Asian". Akibatnya, Jepang menduduki berbagai wilayah dan terlibat konflik di kawasan Asia Pasifik, termasuk negara-negara tetangganya, yakni China, Korea, dan Rusia yang kemudian akan tetap menjadi ganjalan dalam hubungan di masa mendatang.

Ekspansionisme Jepang tercatat sudah terjadi pada era sebelum era Hirohito, yakni pada era Meiji (1868-1912). Terdapat beberapa peristiwa penting pada era Meiji. Di dalam negeri, Restorasi Meiji dan dipindahkannya Ibu Kota Jepang dari Kyoto ke Tokyo, yang keduanya terjadi pada 1868. Pada tahun 1889 Konstitusi Meiji secara resmi diberlakukan dan berakhir dengan digantikan Konstitusi 1947.

Sedangkan terkait eksternal, ekspansionisme era Meiji berakibat pada Perang Jepang-China I (1894-1895), perang Jepang-Rusia (1904) dan pendudukan Korea (1910). Untuk memahami kedekatan geografis Jepang dengan negara-negara sekitar sehingga menarik sebagai sasaran ekspansionisme Jepang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.

Gambar II.1 Peta Jepang dan Negara-Negara Sekitar



Sumber: Asia Atlas, t.t.

Kaisar Hirohito (Showa) bertahta sejak 25 Desember 1926, sampai wafatnya pada 7 Januari 1989, yang kemudian digantikan oleh Kaisar Akihito yang dikenal sebagai era Heisei. Sama halnya era Meiji, pada era Hirohito terjadi ketegangan hubungan Jepang dengan negara-negara tetangga terkait ekspansionisme Jepang. Tercatat pada 1931 terjadi insiden Manchuria, kemudian perang

Jepang-China II kembali terjadi pada 1937. Upaya penghentian ekspansionisme Jepang berakibat pada Perang Pasifik yang berlangsung dari tahun 1942 dan berakhir 1945 ketika Jepang resmi menyerah setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Pada tahun 1946 konstitusi baru diumumkan dan mulai berlaku 1947. Pada waktu itu Jepang berada di bawah kekuasaan Sekutu dengan dipimpin Jenderal Mac Arthur sebagai Supreme Commander for the Allied Power (SCAP). Pada 8 September 1951 ditandatangani Perjanjian San Fransisco antara Jepang dan 49 negara lain, yang menandai perdamaian Jepang dengan negara Sekutu, sekaligus menandai berakhirnya pendudukan Sekutu (Amerika Serikat). Pada saat itu ditandatangani pula Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat yang kemudian diperpanjang pada tahun 1960, dan berlaku sampai sekarang.

B. Kebijakan Pertahanan Jepang

Ketika Jepang berada di bawah Pendudukan Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat, untuk 'mengebiri' Jepang yang ekspansionis, dilakukan Program demokratisasi dan demiliterisasi. Demokratisasi dilakukan dengan membuat Konstitusi 1947 untuk menggantikan Konstitusi Meiji. Sedangkan demiliterisasi dilakukan dengan membubarkan tentara Jepang. Sejak saat itu, dalam masalah pertahanan, Jepang bergantung pada 'payung keamanan' dari Amerika Serikat dengan menjalankan *Seikei Bunri*, dengan

memisahkan urusan ekonomi dan politik, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun ada masalah politik, misalnya dalam berhubungan dagang dengan China.

Pasca Perang Dunia II Jepang yang berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi pasca Perang semakin tampak pada era Shigeru Yoshida, dengan *Yoshida Doctrine*. Prioritas Jepang pada pemulihan ekonomi, sementara masalah keamanan bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat, dan menghindarkan diri dari konflik internasional.

Gambar II.2. Tiga Pilar Utama dan Dua Parameter Lain ‘Yoshida Doctrine’ atau ‘Yoshida Line’.

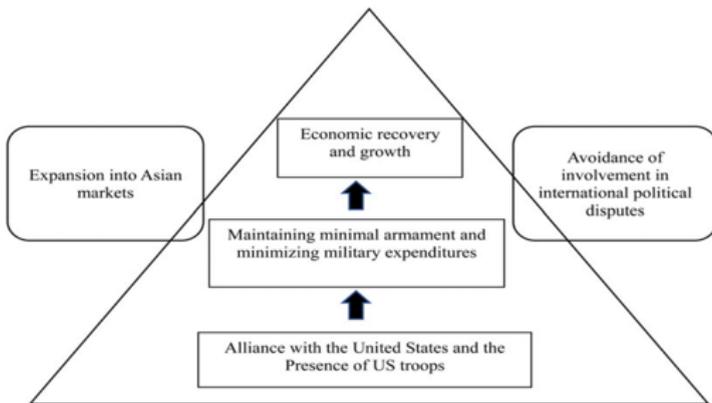


Figure 1. Three main pillars and other two parameters of the 'Yoshida Doctrine' or 'Yoshida Line'.

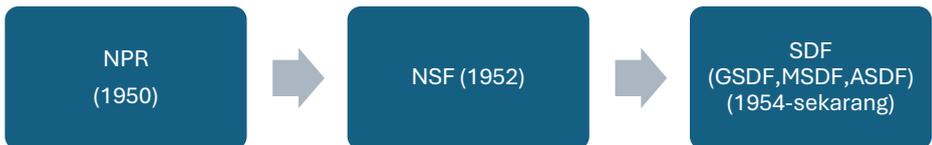
Sumber: Hoshiro (2022)

Peristiwa penting lain, pada 8 Juli 1950 Jendral MAcArthur meresmikan pendirian Polisi Cadangan (National Police Reserve/NPR), yakni polisi cadangan yang bertugas untuk

membantu pasukan pendudukan Amerika dalam menjaga keamanan Jepang. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembubaran tentara Jepang ketika demiliterisasi, sedangkan Jepang dihadapkan pada musuh tradisional seperti China dan Rusia.

Pada 15 Agustus 1952, National Police Reserve (NPR) diubah menjadi National Safety Force (NSF) dan kemudian pada 1 Juli 1954 NSF diubah menjadi Self Defense Force (SDF) sampai sekarang. Self Defense Force terdiri: Ground Self Defense Force (GSDF), Maritime Self Defense Force (MSDF) & Air Self Defense Force (ASDF). Bagan perubahan tersebut tampak pada Gambar 3 berikut.

Gambar II.3. Bagan Perubahan Penamaan Pasukan bela Diri Jepang



Diolah oleh Penulis

Setelah dibentuk SDF, terkait perumusan kebijakan pertahanan dan pengawasan operasional Angkatan Bersenjata Jepang, pada 1 Juli 1954 dibentuk Japan Defense Agency (JDA), di bawah Cabinet Secretariat of Japan. Penyebutan Pasukan Bela Diri, daripada penyebutan tentara, serta tidak dibentuknya Kementerian Pertahanan sebagai Kementerian tersendiri yang independen bisa

dipahami mengingat Konstitusi pasifis Jepang. Lima puluh tiga tahun kemudian, setelah terbentuknya Japan Defense Agency tahun 1954, pada 9 Januari 2007 Kementerian Pertahanan resmi dibentuk.

Pada 20 Mei 1957, pemerintah Jepang mengeluarkan *Basic Policy for National Defense* sebagai pedoman untuk menghindari agresi langsung dan tidak langsung, dengan 4 landasan : 1) Mendukung PBB dalam mempromosikan kerja sama internasional; 2) menstabilkan mata pencaharian rakyat dan patriotisme; 3) membangun kemampuan pertahanan rasional untuk membela diri dan ; 4) jika terjadi agresi dari luar, mendasarkan pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat, sampai PBB turun tangan. ((GRIPS) & Institute for Advanced Studies on Asia (IASA), 1957)

Dari kebijakan ini tampak bahwa Jepang masih menekankan pada upaya pemulihan ekonomi, namun disisi lain juga berupaya mulai membuat landasan pengaturan untuk pengaturan SDF dan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat sebagai landasan kebijakan keamanannya sebagai antisipasi agresi dari pihak luar Jepang.

Ketergantungan Jepang terhadap perlindungan keamanan Amerika Serikat untuk deterens semakin menguat dengan kebijakan *The Three Non-Nuclear Principles*. Perkembangan penting terjadi ketika pada 11 Desember 1967, Perdana Menteri Eisaku Sato mencanangkan *The Three Non-Nuclear Principles*, yakni untuk tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak mengizinkan

pengenalan senjata nuklir, sejalan dengan Konstitusi Perdamaian Jepang (Statement by Prime Minister Eisaku Sato at the Budget Committee in the House of Representative (December 11th, 1967). Komitmen ini berlaku sampai sekarang, dan ini bisa dipahami dengan beberapa faktor berikut : 1) selaras dengan Konstitusi Pasifik Jepang; 2) memposisikan Jepang sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian internasional dan bebas senjata nuklir; 3) dapat meredam opini publik Jepang maupun masyarakat internasional yang anti senjata nuklir; 4) dengan komitmen tersebut, dapat menjaga stabilitas kawasan sebagai upaya *Confidence Building Measures*, terutama terkait *information measure*. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, keputusan Jepang tentu tidak terlepas dari jaminan keamanan dari Amerika Serikat.

Jepang yang secara ekonomi semakin maju, dalam hal pertahanan semakin berupaya menonjolkan karakteristik baru sebagai negara yang cinta damai, mengedepankan deterens dan defensif daripada ofensif. Penekanan komitmen dengan menciptakan kekuatan pertahanan Jepang yang secara efektif dapat menangkal dan menahan serangan, daripada kemampuan menyerang (ofensif) tampak ketika tahun 1976, Jepang mengeluarkan *National Defense Program Outline* (NDPO) yang sejalan dengan 4 Landasan *Basic Policy for National Defense* 1957.

Policy for National Defense 1957 menjadi Program Pembangunan Pertahanan Pertama yang diimplementasikan tahun 1958-1961; kedua, (1962-1966); Ketiga (1967-1971), dan; Keempat

(1972-1976). Semua dokumen tersebut memberikan pedoman lima tahunan untuk kemampuan pertahanan jangka menengah yang harus dimiliki Jepang. NDPG 1996, 2005, 2011, dst menunjukkan respons Jepang terhadap situasi internasional, seperti kondisi Pasca Perang Dingin, terorisme, maupun harapan terhadap peran internasional SDF.

Perubahan signifikan tampak ketika pada tahun 2018 Jepang mengajukan kemampuan "Multi Domain Defense Force" (Pertahanan Multi Domain)" sehingga dapat memadukan kemampuan lintas domain seperti domain luar angkasa, dan spektrum elektromagnetik, selain dengan tetap memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat sebagai upaya membangun kemampuan pertahanan yang efektif. (Defense, National Defense Program Guidelines (NDPG) and Medium Term Defense Program (MTDP)). Perubahan ini membawa Jepang kepada performa militer yang lebih komprehensif dan fleksibel yang memungkinkan Jepang mengantisipasi serangan siber, ruang angkasa maupun teknologi baru.

Selain mengadopsi kebijakan pertahanan yang lebih progresif sejalan dengan konsep *Proactive Contribution to Peace*, Jepang juga semakin jelas dalam memposisikan diri memelihara stabilitas keamanan regional dan dengan memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

Kecenderungan ini semakin tampak ketika era Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan konsep *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) yang kemudian berusaha diperkuat oleh Perdana Menteri Fumio Kishida.

Era kepemimpinan Kishida juga melakukan reinterpretasi terhadap Konstitusi "Damai" 1947 dengan mengeluarkan 3 kebijakan baru terkait pertahanan yakni *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Strategy* (NDS) dan *Military Build Up*. Kishida juga memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat yang disebutnya sebagai Global Partner. Secara multilateral, Kishida juga berupaya menjalin dialog melalui QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) bersama India, Australia dan Amerika Serikat dengan kerja sama mencakup kerja sama maritim, latihan bersama serta menjaga kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka melalui FOIP, yang bagi sebagian pengamat dipandang sebagai upaya menyaingi *Belt and Road Initiatives* (BRI) China.

Dari perkembangan kebijakan pertahanan Jepang tersebut tampak, bahwa kebijakan pertahanan Jepang sangat dinamis, namun terlalu dini untuk mengatakan bahwa performa kebijakan pertahanan militer Jepang akan kembali bergeser ke performa ofensif.

BAB III

JEPANG DAN ALIANSI KEAMANAN JEPANG-AMERIKA SERIKAT

Untuk tujuan berkontribusi pada keamanan Jepang dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh, Amerika Serikat diberikan penggunaan fasilitas dan area di Jepang untuk pasukan darat, udara dan angkatan lautnya .(Japan M. o., Japan-U.S Security Treaty : TREATY OF MUTUAL COOPERATION AND SECURITY BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA)

A. Awal Mula Hubungan Jepang-Amerika Serikat

Hubungan resmi Jepang dan Amerika Serikat dimulai dengan ditandatanganinya *The Japan-US Treaty of Peace and Amity* pada 31 Maret 1854 di Kanagawa, oleh karena itu dikenal juga sebagai Perjanjian Kanagawa. Perjanjian ini menjadi perjanjian resmi pertama Jepang dengan negara Barat, dan sebetulnya merupakan tekanan dari Komodor Matthew C Pherry terhadap Shogun Tokogawa. Perjanjian Kanagawa banyak memberi konsesi kepada Amerika Serikat pasca Politik Isolasionis (*Sakoku*).

Pada abad 19 Jepang menganut Politik Luar Negeri yang Isolasionis atau yang dikenal dengan "sakoku". Prinsip Politik Luar Negeri ini menutup diri dalam segala bidang dengan melarang intervensi asing dan melarang orang Jepang bepergian keluar negeri.

Hubungan luar negeri Jepang waktu itu hanya dilakukan dengan Belanda dan China dengan memberi akses ke Pelabuhan Nagasaki.

Kebijakan *Sakoku* ini berakhir dengan kedatangan armada yang dipimpin Komodor Perry dan memaksa Jepang membuka diri dengan menandatangani Perjanjian Kanagawa.

Perjanjian Kanagawa terdiri dari 12 pasal, dan berisi 4 hal :

1. Pembukaan Pelabuhan: Jepang setuju untuk membuka Pelabuhan Simoda dan Hakodate, menyediakan kayu, batubara dan apapun yang diperlukan kapal-kapal Amerika Serikat, selama bahan-bahan tersebut dimiliki Jepang (Pasal II).

2. Perlindungan bagi Pelaut Amerika Serikat, bahwa jika terjadi kapal karam, maka warga Amerika Serikat, warga asing lain harus tidak dikenakan kurungan dan tunduk pada hukum yang adil, tidak seperti perlakuan terhadap warga Belanda dan China di Nagasaki (Pasal IV dan V).

3. Pembukaan Konsulat Amerika Serikat di Jepang. Pasal XI : bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menunjuk Konsulat atau agen yang akan ditempatkan di Simoda

4. *Most Favored Nations Clause*. pada Pasal VII dan VIII : meski tidak secara eksplisit, tetapi secara implisit mengandung unsur *Most Favored Nations Clause* bagi Amerika Serikat masa mendatang. Dimana kapal-kapal Amerika Serikat harus diizinkan untuk membawa emas, perak dan barang-barang lain ke Pelabuhan terbuka

Jepang. Untuk isi lengkap Perjanjian dapat dilihat pada https://avalon.law.yale.edu/19th_century/japan002.asp (Library, 2008)

Setelah Perjanjian Kanagawa yang menjadi dasar membuka hubungan Jepang dan Amerika Serikat, pada 1858 Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan (*Treaty of Amity and Commerce*) Jepang-Amerika Serikat berhasil ditandatangani atas negosiasi Townsend Harris, sehingga dikenal juga dengan Perjanjian Harris. Perjanjian Harris terdiri dari 14 pasal dengan beberapa poin, di antaranya : 1) pembukaan konsulat di Yedo dan di beberapa kota pelabuhan di Jepang, dan sebaliknya Jepang dapat membuka konsulat di Washington (Pasal 1); penambahan pembukaan pelabuhan untuk perdagangan dengan Amerika Serikat, di antaranya Kanagawa, Nagasaki (Pasal 3) . Poin penting lainnya adalah, jika terjadi perbedaan pandangan antara Jepang dengan negara Eropa, maka Amerika Serikat atas permintaan Jepang akan bersikap bersahabat dengan Jepang (Pasal 2). Salah satu pasal kontroversial adalah pasal yang memuat bahwa jika warga Amerika Serikat melakukan tindak pidana di Jepang, maka akan diadili Pengadilan Konsuler Amerika, dan jika dinyatakan bersalah, akan dihukum sesuai Hukum Amerika Serikat (Pasal 6). Perjanjian lengkap dapat diakses pada laman : <https://worldjpn.net/documents/texts/pw/18580729.TIE.html> ((GRIPS) & Institute for Advanced Studies on Asia (IASA))

Gambar III.1. *Treaty of Amity and Commerce between Japan and the United States*, or "Harris Treaty", 29 July 1858



Sumber: Wikimedia Commons (2011)

Dari kedua perjanjian di atas, tampak bahwa ada posisi tidak setara antara Jepang dan Amerika Serikat, dimana kedua perjanjian banyak memberi keuntungan bagi Amerika Serikat, terutama dalam memperoleh akses ekonomi dan pasar di Jepang. Di satu sisi kedua perjanjian ini menjadi jalan bagi Jepang melakukan transformasi sosial, politik maupun ekonomi untuk menjadi Jepang yang modern, namun disisi lain juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan samurai yang memunculkan Restorasi Meiji tahun 1868-1912 yang menandai berakhirnya pemerintahan Tokugawa, dan pemerintahan kembali terpusat dipimpin Kaisar.

B. Dinamika Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat

Hubungan Jepang dan Amerika Serikat era modern ditandai dengan kekalahan Jepang pada perang Dunia II. Jepang di bawah pemerintahan Kaisar Hirohito atau yang juga dikenal dengan Kaisar Showa (1926-1989) dengan dibantu Perdana Menteri Hideki Tojo berambisi membentuk *The Greater East Asia co Prosperity sphere* (Asia Timur Raya) yakni untuk membentuk blok perdagangan di kawasan Asia Pasifik, namun pada akhirnya adalah upaya untuk menguasai sumber daya alam di negara-negara yang dikuasainya. Adapun negara-negara yang berhasil dikuasai Jepang di antaranya: Tiongkok, Korea, Taiwan, Indo China (Laos, Kamboja, Vietnam), Indonesia (Hindia Belanda), Malaysia (Malaya dan Singapura), Myanmar (Burma), Thailand, beberapa Pulau di Pasifik, di India Timur (Andaman dan Nikobar), Hongkong, dan Guam dan beberapa Pulau Mikronesia. Khusus untuk Thailand, tidak mengalami pendudukan militer oleh Jepang, namun digunakan Jepang sebagai basis jalur pasokan strategis untuk operasinya di Burma dan Malaya.

Ekspansionisme Jepang berakhir dengan menyerahnya Jepang di bawah Sekutu pasca dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang kemudian harus tunduk di bawah Sekutu pimpinan Amerika Serikat dengan SCAP (Supreme Commander for the Allied Power) Jendral MacArthur yang melakukan program demiliterisasi dan demokratisasi. Demiliterisasi dilakukan dengan membubarkan tentara Jepang. Saat itu Jepang menjalankan Politik *Seiki Bunri* dan *Yoshida Doctrine*, yakni untuk

berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi, sementara masalah keamanan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Adapun demokratisasi dilakukan dengan membentuk Konstitusi 1947, menggantikan Konstitusi Meiji. Konstitusi 1947 yang dikenal juga sebagai Konstitusi Damai, Konstitusi Pasca Perang atau Konstitusi Showa ini secara spesifik pada pasal 9 menghapus hak Jepang untuk berperang dan membatasi hanya pada kekuatan defensif.

Pendudukan Sekutu berakhir ketika pada 8 September 1951 Jepang menandatangani Perjanjian San Fransisco atau yang dikenal *Treaty of Peace with Japan* yang mengakhiri imperialisme Jepang dengan negara Sekutu, dan mulai berlaku 28 April 1952.

Selain Perjanjian San Fransisco, pada saat bersamaan juga ditandatangani Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat (*The US-Japan Security Alliance*), yang mulai berlaku 1952 dan diperpanjang 1960. Adapun isi aliansi adalah: akan saling membantu satu sama lain jika terjadi serangan di wilayah yang dilindungi traktat tersebut; memberi wewenang kepada Amerika Serikat penggunaan fasilitas dan wilayah di Jepang; bantuan ekonomi dan teknis dari Amerika Serikat kepada Jepang untuk pemulihan ekonomi dan infrastruktur Jepang; konsultasi reguler dan Latihan Bersama. Traktat ini kemudian diperbaharui di Washington pada 19 Januari 1960 dipimpin Nobusuke Kishi dan Douglas MacArthur 2nd, dan terus diperpanjang sampai sekarang.

Pembaharuan aliansi Keamanan Jepang - Amerika Serikat pada 1960 dilakukan dengan merevisi sehingga memberikan hak pada Amerika Serikat untuk membangun basis militer dan sebagai pertukarannya, Amerika Serikat berkomitmen membantu Jepang, jika Jepang menghadapi serangan. Pengaturan penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang disepakati dalam *Agreement Under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States of America and Japan, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan*. Pada Pasal 2 menyebutkan tentang penggunaan area dan fasilitas oleh Amerika Serikat di Jepang. ((.mil), 1960)

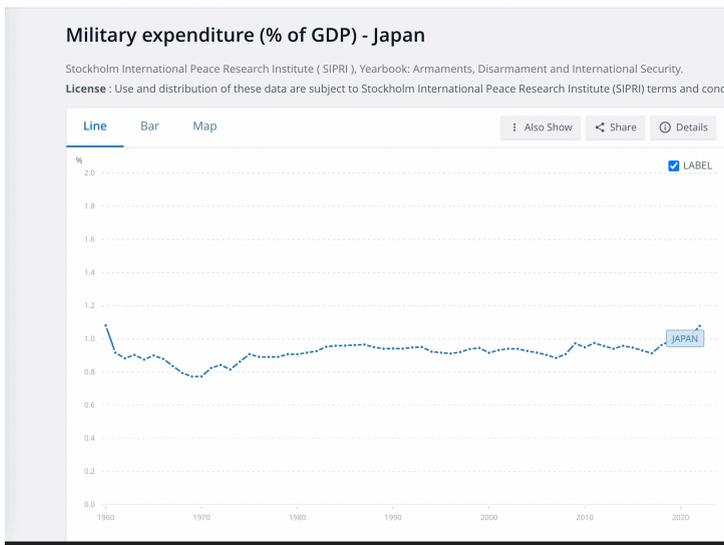
C. Masalah *Burden Sharing*

Perkembangan penting terjadi ketika pada tahun 1977 Amerika Serikat mulai mewacanakan untuk *burden sharing* terkait penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang. Laporan tahun 1977 mencatat bahwa Jepang telah berkembang menjadi negara adidaya ekonomi, tetapi kendala politik, konstitusional, dan psikologis membatasi kemampuannya untuk memperluas atau menggunakan kekuatan militer. Pembagian biaya utama oleh Jepang untuk pasukan AS pada tahun 1977 adalah penyediaan tanah dan fasilitas yang menelan biaya lebih dari \$ 100 juta per tahun. (Office, 1982).

Terkait tuntutan untuk 'berbagi beban' dalam masalah pertahanan, Jepang menyadari bahwa di satu sisi terkait kemajuan

ekonominya Jepang harus berperan lebih untuk perdamaian internasional, namun disisi lain terkendala dengan Konstitusi maupun psikologis kelompok *pasifis* di Jepang. Akibatnya, Jepang selama ini berkomitmen untuk selalu menjaga anggaran belanja pertahanan sekitar 1% GDP. Sebagai pembanding, negara-negara anggota NATO mengalokasikan anggaran belanja pertahanan sebesar 2% GDP, sementara Korea Selatan, Taiwan, India berkisar 2,5% GDP. Gambar 4 berikut menunjukkan kisaran anggaran belanja pertahanan Jepang dari tahun 1960an sampai 2020.

Gambar II.2. Prosentase GDP Anggaran Belanja Pertahanan Jepang

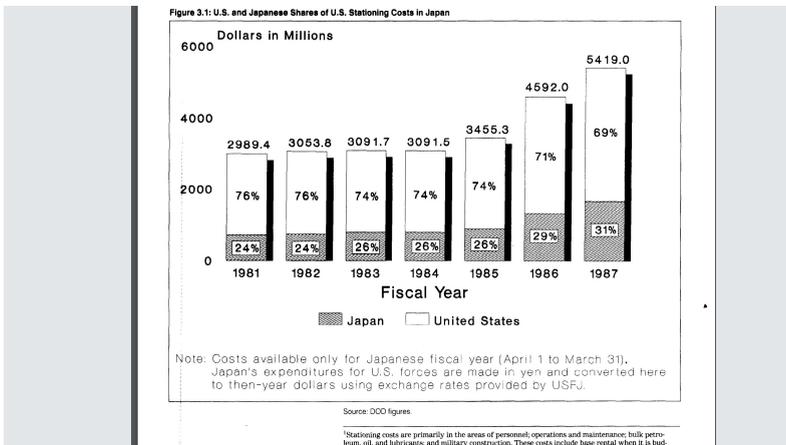


Sumber: World Bank (2022)

Tekanan untuk *burden sharing* semakin menguat pada tahun 1980an dan bahkan tuduhan Jepang sebagai *free rider* sangat kuat. Pada tahun 1987 Kongres Amerika Serikat bahkan menuntut Jepang

untuk mengalokasikan 3% GDP untuk belanja pertahanan. Permintaan yang sulit dikabulkan oleh Jepang. Namun demikian karena GDP Jepang yang terus meningkat, maka *burden sharing* dengan Amerika Serikat juga meningkat. Gambar 5 berikut menunjukkan peningkatan prosentase pembagian beban yang ditanggung Jepang terkait biaya penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang .

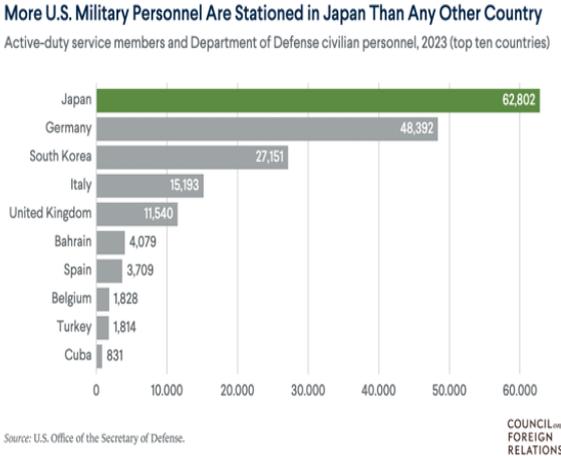
Gambar III.3. Pembagian Biaya penempatan Pasukan Amerika Serikat di Jepang



Terlepas dari persoalan 'buden sharing' letak Jepang yang strategis, dapat dimanfaatkan Amerika Serikat sebagai 'corner stone' ketika Amerika Serikat harus terlibat dalam konflik di kawasan Asia Pasifik, seperti antara lain pada Perang Korea dan Perang Vietnam dimana Amerika Serikat dapat mengirim pasukannya di Jepang ke Vietnam maupun Korea. Besarnya jumlah pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Jepang, jika dibandingkan di wilayah

negara lain juga menunjukkan indikasi tersebut. Gambar 6 berikut menunjukkan penempatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Jepang dibanding di negara-negara lain, dimana Jepang menempati urutan pertama.

Gambar III.4. Perbandingan Pasukan Militer Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Jepang dibandingkan di negara lain



Sumber: Council on Foreign Relations (2024)

Banyaknya penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang dibandingkan di kawasan negara lain, menunjukkan bahwa Jepang menempati posisi strategis bagi Amerika Serikat.

Meski Jepang harus menjaga performa sebagai negara yang mengedepankan deterens dan defensif dalam masalah pertahanan, namun karena PDB yang tinggi, maka anggaran pertahanan masih termasuk 10 besar dalam peringkat anggaran belanja pertahanan,

untuk melindungi penduduk dengan jumlah peringkat ke 11 dunia, seperti tampak pada Gambar 6 dan 7 berikut .

Gambar III.5. Peringkat anggaran belanja Pertahanan 15 Besar negara di dunia (2022)

Military expenditure by the top 15 countries reached \$1842 billion in 2022 and accounted for 82% of global military spending.

Rank	Countries	Military expenditure (US\$)
1	United States	877.0 b
2	China	292.0 b
3	Russia	86.4 b
4	India	81.4 b
5	Saudi Arabia	75.0 b
6	United kingdom	68.2 b
7	Germany	55.8 b
8	France	53.6 b
9	South Korea	46.4 b
10	Japan	46.0 b
11	Ukraine	44.0 b

Sumber: SIPRI (2023)

Gambar III.6. Peringkat Populasi Dunia Tahun 2022

Population 2022 Ranking

Ranking	Economies	Thousand
1	India	1,417,173
2	China	1,412,175
3	United States	333,288
4	Indonesia	275,501
5	Pakistan	275,501
6	Nigeria	218,541
7	Brazil	215,313
8	Bangladesh	171,186
9	Russian Federation	143,556
10	Mexico	127,504
11	Japan	125,125

Sumber: World Bank (2023)

Bagi Jepang, mempertahankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dapat berfungsi deterens dalam menghadapi China, Korea Utara maupun Rusia. Disisi lain, dengan 'bersandar' pada aliansi Jepang Amerika Serikat, Jepang tidak perlu meningkatkan anggaran belanja pertahanan secara radikal yang dapat meningkatkan kecurigaan negara sekitar.

Dengan demikian Aliansi Keamanan Jepang Amerika Serikat merupakan opsi yang paling optimal bagi Jepang. Bukan hanya mempertahankan aliansi, namun pada era Fumio Kishida menunjukkan aliansi yang justru semakin menguat. Setidaknya terdapat 2 indikasi penguatan aliansi: 1) Dalam dokumen *National Security Strategic* yang menekankan pentingnya kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, dan langkah langkan untuk memperkuat kemampuan militer Jepang; 2) Pidato Perdana Menteri Kishida Fumio pada 11 April 2024 ketika berkunjung ke Washington, yang menyatakan sepaham dengan Presiden Joe Biden untuk memperkuat kemitraan dalam pidatonya "For the Future our Global Partnership". Pada pidatonya, Kishida menggarisbawahi pentingnya peran global Amerika Serikat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk China yang disebutnya sebagai "unprecedented and the greatest strategic challenge". (Japan M. o., Address to a Joint Meeting of the U.S. Congress KISHIDA Fumio, Prime Minister of Japan For the Future: Our Global Partnership, 2024).

BAB IV

JEPANG DAN PERSEPSI CHINA SEBAGAI ANCAMAN

Beralih ke tetangga Jepang sendiri, sikap eksternal dan tindakan militer China saat ini menghadirkan tantangan strategis terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya bagi perdamaian dan keamanan Jepang tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional pada umumnya. (Japan M. o., Address to a Joint Meeting of the U.S. Congress KISHIDA Fumio, Prime Minister of Japan For the Future: Our Global Partnership, 2024)

A. Pendahuluan

Hubungan bilateral Jepang-China bersifat sangat dinamis dan kompleks, sekaligus penting dalam memelihara keseimbangan dan perdamaian kawasan Asia Pasifik, bahkan global. Secara historis, Jepang dan China merupakan musuh tradisional mengingat perebutan pengaruh di wilayah Asia Timur, bahkan pernah 2 kali terlibat perang. Pasca normalisasi hubungan tahun 1972, kedua negara memiliki kerja sama ekonomi baik perdagangan, investasi maupun bantuan luar negeri, namun dalam hal politik dan keamanan, hubungan Jepang-China sering pula mengalami friksi yang dapat berdampak pada stabilitas kawasan.

Friksi bersumber dari perbedaan persepsi, terutama menyangkut ancaman keamanan, peningkatan kapabilitas militer maupun perebutan perluasan pengaruh (*sphere of influence*) antara

China dan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Friksi dan hubungan Jepang dengan China semakin fluktuatif dengan peningkatan performa militer China, serta upaya perluasan pengaruh melalui *Belt and Road Initiative*. Konsep *Free and Open Indo Pacific (FOIP)* yang diluncurkan pemerintah Jepang, sering dianggap sebagai pesaing *Belt and Road Initiative* China. Sementara Jepang didukung aliansi Keamanan dengan Amerika Serikat dimana Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan di kawasan Asia Pasifik..

Ganjaan hubungan Jepang dan China juga terkait klaim tumpang tindih Pulau Senkaku, atau yang oleh China disebut sebagai Diayou.

B. Sejarah Hubungan China -Jepang era Sebelum Perang Dunia II

Jepang merupakan negara yang miskin sumber daya alam. Situasi tersebut ditambah kebutuhan ekonomi, letak geografis yang berdekatan, serta persaingan perebutan pengaruh di kawasan Asia Timur, membuat Jepang dan China terlibat perang.

1. Perang Jepang-China I (1894-1895)

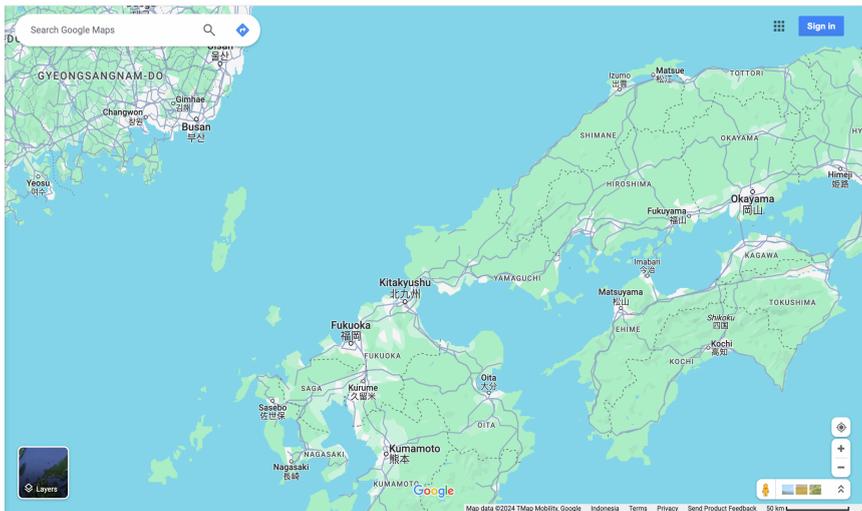
Perang I terjadi tahun 1894-1895 dimana perang berhasil dimenangkan oleh Jepang yang waktu itu sudah berhasil mengembangkan kekuatan militer seperti negara Barat.

Perang Jepang - China I disebabkan karena perebutan pengaruh (*sphere of influence*), terutama di wilayah Korea yang waktu itu masih lemah. Korea yang kaya sumber daya alam, terutama besi dan batubara, menjadi daya tarik bagi kepentingan Jepang. Jepang yang memaksa Korea untuk membuka perdagangan, khususnya dengan Jepang dan menyatakan merdeka dari China untuk urusan luar negeri.

Perebutan pengaruh antara Jepang dan China di Korea, dimana China ingin mempertahankan konservatisme, sementara Jepang ingin melakukan modernisasi ala Barat. Peperangan pecah ketika kelompok yang pro Jepang berupaya melakukan kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa, namun berhasil digagalkan tentara China. Perang diakhiri dengan penandatanganan Konvensi Li-Ito, dimana Jepang dan China bersedia menarik pasukan dari Korea (Britannica, 2024).

Perang China-Jepang I berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Shimonoseki, dikenal juga sebagai Perjanjian Maguan, diratifikasi di Shimonoseki pada 17 April 1895. Shimonoseki merupakan kota pelabuhan strategis di bawah Prefektur Yamaguchi, terletak dekat Selat Korea, sehingga menjadi penting baik bagi Jepang maupun China. (lihat peta di bawah)

Gambar IV.1. Peta Wilayah Perjanjian Shimonoseki



Sumber : Google Maps

Perjanjian Shimonoseki yang mengakhiri Perang Jepang - China I ini banyak memberi kemenangan bagi Jepang, tampak dari berupa keuntungan pada Jepang. Dalam perjanjian tersebut Jepang mendapat Semenanjung Liaodong, Taiwan (Formosa) dan Pescadores dari China (2024, 2024).

2. Perang Jepang - China II (1937-1945)

Perang Jepang-China kembali berlangsung pada 1937-1945. Perang kembali terjadi ketika pada tahun 1930an Jepang berupaya memperluas hegemoni di kawasan Asia Timur, di lain pihak China berupaya menghalangi upaya tersebut.

Ketegangan hubungan China-Jepang kembali terjadi ketika Jepang menduduki Manchuria pada tahun 1932. Pendudukan

berakhir tahun 1945 ketika Jepang telah menyerah kalah pada Perang Dunia II. Namun demikian pada masa mendatang, berbagai peristiwa sebelum Perang Dunia II tersebut memiliki dampak pada hubungan China-Jepang dan Kawasan Asia timur umumnya.

Normalisasi hubungan Jepang-China dilakukan pada tahun 1972, ditandai dengan Komunike Bersama Jepang-China yang terdiri dari 9 poin dan ditandatangani di Peking pada 29 September 1972. Pada poin kedua dan ketiga, pemerintah Jepang mengakui bahwa People's Republic China (PRC) merupakan pemerintahan China yang legal, dan memahami Taiwan yang diposisikan China sebagai bagian dari China (Japan M. o., Joint Communiqué of the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China, 1972).

Selain persaingan geopolitik, Jepang yang memposisikan diri sebagai sekutu bagi Amerika Serikat, serta perbedaan ideologi pada era Perang Dingin, maka hubungan Jepang-China menjadi dinamis. Dinamika hubungan Jepang-China makin fluktuatif terkait beberapa hal, diantaranya:

- 1) Klaim tumpang tindih Pulau Senkaku (Diayou-tai).

Pada tahun 1375 China sudah menggunakan Pulau Diayou (senkaku) untuk navigasi, namun pada 14 Januari 1895 Jepang memasukkan Diayou (Senkaku) ke dalam Prefektur Okinawa. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, dan Jepang di bawah pendudukan Amerika Serikat, Okinawa termasuk dalam pengawasan Amerika

Serikat, yang berlangsung sampai 1972. Secara geografis Okinawa menempati posisi strategis baik bagi Jepang, China maupun Amerika Serikat. Pada tahun 1971 Taiwan dan PRC mengajukan klaim atas Pulau Diaoyu (Senkaku), tetapi kemudian 17 Juni 1971 Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Okinawa yang menempatkan Okinawa di bawah kontrol administrasi Jepang. Sengketa Diaoyu (Senkaku) sementara teredam dengan dikesampingkannya masalah tersebut setelah komunikasi bersama 1972 yang sepakat membangun hubungan dengan saling mengakui kedaulatan dan integritas wilayah mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Gambar IV.2. Letak Kepulauan Senkaku (Diaoyu) yang masih dipersengketakan



Sumber: Wikipedia (2013)

Sengketa Jepang-China kembali terjadi ketika pada tahun 1992 China mengeluarkan Peta teritorial yang secara eksplisit mencakup wilayah yang dipersengketakan. Beberapa insiden terjadi di kawasan tersebut diantaranya tabrakan kapal ikan, demonstrasi oleh aktivis Hongkong dan Taiwan, dan pendudukan oleh aktivis Jepang.

Peristiwa penting terkait sengketa Pulau Senkaku yang mempengaruhi hubungan Jepang - China terjadi ketika pada 11 September 2012 Pemerintah Jepang melakukan nasionalisasi atas Kepulauan Senkaku, khususnya Uotsuri, Minamikojima dan Pulau Kitakojima. Sebetulnya nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Jepang adalah sebagai upaya pemerintah Jepang untuk mencegah eskalasi terkait kemungkinan kepemilikan Kepulauan tersebut Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara.

Nasionalisasi tersebut selain menimbulkan protes dari China, demonstrasi publik, justru menjadi justifikasi bagi China untuk meningkatkan aktivitas militernya di wilayah tersebut. Pada tahun 2013 pemerintah China mengeluarkan ADIZ (*Air Defense Identification Zone/ Zona Identifikasi Pertahanan Udara*) yang mencakup wilayah yang dipersengketakan tersebut. Peningkatan aktivitas *China Coast Guard* (CCG) di kawasan Senkaku juga terus meningkat, bahkan beberapa kali mengalami insiden dengan kapal nelayan Jepang. Tercatat pada tahun 2021, Kapal Penjaga Pantai China membuntuti kapal nelayan Jepang di kawasan Senkaku sebanyak 18 kali. Sedangkan secara keseluruhan kapal penjaga

pantai (CCG) berlayar di kawasan yang dipersengketakan tersebut total sebanyak 332 kali (Jun, 2022) .

Untuk meningkatkan pengamanan, Jepang mendirikan pangkalan militer di Yonaguni (2016), Miyako (2019) dan Ishigaki (2023) yang berdekatan dengan China maupun Taiwan.

Selain sengketa Senkaku yang belum terselesaikan, Taiwan juga strategis bagi Jepang karena letaknya yang hanya 68 mil (110 km) dari Pulau Yonaguni. Pentingnya Taiwan bagi Jepang, antara lain tampak pernyataan Shinzo Abe (2021) bahwa "keadaan darurat Taiwan adalah keadaan darurat Jepang".

Implikasinya, jika keadaan darurat Taiwan dipandang sebagai keadaan darurat bagi Jepang, maka dengan demikian menjadi keadaan darurat pula bagi Aliansi Keamanan Jepang.

Pada 16 Desember 2022 pemerintah Kishida secara resmi meluncurkan paket Kebijakan Pertahanan baru yang meliputi *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Strategy* (NDS) dan *Military Build Up*. Implementasi kebijakan tersebut adalah *Military Build Up* dengan peningkatan anggaran Belanja Pertahanan sebesar 2% PDB sampai tahun 2027. Adapun salah satu alasan pemerintah Jepang adalah perilaku China. Untuk belanja pertahanan tahun 2023, secara eksplisit Jepang memandang :1) perilaku China, Korea Utara dan Rusia sebagai perhatian serius bagi Jepang. Perilaku China yang pada 4 Agustus 2022, meluncurkan 9 rudal balistik dimana lima diantaranya mendarat di wilayah Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) , aktivitas militer China di sekitar Jepang Jepang yang terus meningkat dan semakin intensif; 2) Rudal Korea Utara semakin intensif diluncurkan dan aktivitas militernya menunjukkan sikap semakin menjadi ancaman serius dan dekat bagi keamanan nasional Jepang dibanding sebelumnya; 3) Agresi Rusia terhadap Ukraina dan aktivitas militer Rusia di kawasan Indo Pasifik, termasuk Jepang, bersamaan dengan koordinasi strategi jangka panjang dengan China, menjadi perhatian serius dari perspektif pertahanan (Defense, 2022) (Affairs, 2023). Dengan demikian tampak jelas bahwa faktor eksternal Rusia, China dan Korea Utara menjadi dasar bagi Jepang untuk melakukan perubahan kebijakan.

Konsistensi sikap Jepang yang memandang China menjadi alasan utama bagi Jepang untuk melakukan evaluasi kebijakan Pertahanannya masih tampak pada tahun berikutnya. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, sikap eksternal China saat ini, kegiatan militer, dan kegiatan lainnya telah menjadi masalah serius bagi Jepang dan komunitas internasional, dan menghadirkan tantangan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terbesar. Jepang memandang perlu menanggapi dengan kekuatan nasional yang komprehensif dalam memastikan perdamaian dan keamanan Jepang serta perdamaian dan stabilitas komunitas internasional, serta dalam memperkuat tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum, yang harus ditanggapi Jepang dengan kekuatan nasionalnya yang komprehensif termasuk

kemampuan pertahanan dan dalam kerja sama dan kolaborasi dengan sekutunya, negara-negara yang berpikiran sama, dan lainnya (Defense 2023).

Terkait persepsi ancaman China, dalam *Japan Diplomatic Blue Book 2023*, pemerintah Jepang juga memandang penting ketika pada Kongres Nasional Partai Komunis ke 20 pada bulan Oktober, Sekjen Partai Komunis China Xi Jinping kembali menegaskan bahwa China bertujuan menjadi negara sosialis yang kuat, modern, pada pertengahan abad, menegaskan "Perubahan penting seperti tidak pernah terjadi sebelumnya". dan melintasi dunia. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya China untuk memperluas hegemoni ke seluruh dunia. (M. o. Japan, Diplomatic Blue Book 2022 2023)

Persepsi ancaman China, menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Jepang untuk menganggarkan belanja pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2027. Hal ini mencerminkan perubahan progresif dalam kebijakan militer Jepang, dimana selama ini di bawah *senshu boei pascaperang* (secara resmi diterjemahkan sebagai 'kebijakan berorientasi pertahanan eksklusif'), Jepang telah membatasi pengeluaran militer sebesar 1 persen dari PDB dan membatasi kemampuan militernya pada apa yang diperlukan untuk mengusir serangan bersenjata di wilayahnya. (Xiao Liang, 2023)

Namun demikian, untuk membangun saling percaya terkait kebijakan pertahanan, Jepang dan China memiliki mekanisme, diantaranya Dialog Keamanan Jepang-China. Pada Putaran ke 17

Dialog Keamanan Jepang - China, kedua negara menghasilkan 3 kesepakatan penting :1) Jepang dan China sepakat untuk secara terbuka saling bertukar informasi terkait kebijakan pertahanan, terkait Pulau Senkaku, latihan bersama dengan Rusia; 2) Hotline antara Otoritas Pertahanan Jepang dan China" di bawah "Mekanisme Komunikasi Maritim dan Udara antara Otoritas Pertahanan Jepang dan China "; 3) Terkait Ukraina agar China menjalankan peran internasional untuk memelihara keamanan internasional. (Japan M. o., Press Release: The 17th Japan-China Security Dialogue (Overview), 2023)

Hubungan Jepang - China menunjukkan hubungan yang dinamis dan pelik. Kedua negara memandang perlu dibangunnya saling pemahaman, meski di sisi lain Jepang secara eksplisit memandang China sebagai 'ancaman yang bagi keamanan internasional sebagaimana disampaikan pada Pidato Kishida dalam *Japan-US Global partnership*.

BAB V

JEPANG DAN DUA KOREA

Provokasi Korea Utara telah mempengaruhi kawasan. (Korea Utara) juga mengeksport rudal balistik untuk mendukung Perang Rusia terhadap Ukraina, yang semakin memperparah penderitaan rakyat Ukraina (Japan M. o., Address to a Joint Meeting of the U.S. Congress KISHIDA Fumio, Prime Minister of Japan For the Future: Our Global Partnership, 2024)

A. Sejarah Hubungan Jepang-Korea sebelum Perang Dunia

II

Hubungan Jepang dan Korea sejak awal mengalami pasang surut. Korea yang pada abad 19 merupakan kerajaan lemah, menjadi ajang perebutan pengaruh Jepang dan China.

Ketika Jepang semakin unggul dan berhasil mengalahkan China dalam Perang Jepang-China, serta berhasil mengungguli Rusia dalam Perang Jepang-Rusia, maka posisi Korea yang terletak antara Jepang, Rusia dan China menjadi semakin terjepit. (lihat peta berikut)

Gambar V.1. Peta ketika Jepang Semakin Unggul dalam Perang Jepang-China dan Perang Jepang-Rusia



Sumber: World Atlas, t.t.

Jepang menduduki Kekaisaran Daehan Jeguk 大韓帝國 pada tahun 1910. Namun sebetulnya sejak 1905, ketika Rusia mengalami kekalahan atas Jepang. Jepang memaksa Korea dengan 5 kesepakatan: 1) Protokol Jepang-Korea, 23 Februari 1904; 2) Perjanjian Jepang-Korea I, 22 Agustus; (3) Perjanjian Jepang-Korea II atau perjanjian Eulsa, 17 November 1905; (4) Perjanjian Jepang - Korea 1907, dan; (5) Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea, 29 Agustus 1910. (Taejin Lee/ Yi, 2016)

Di bawah aneksasi Kekaisaran Jepang, Korea yang dianggap sebagai negara yang tertinggal, sehingga perlu direformasi dengan melakukan “Jepangisasi”. Pendudukan Jepang telah menghapus sejarah budaya dan Bahasa Korea membakar ribuan dokumen

Korea, merobohkan bangunan-bangunan bersejarah, termasuk istana Kerajaan Gyeongbokgung, yang dibangun Dinasti Joseon pada tahun 1395. Selain itu banyak terjadi pembantaian massal, diantaranya pembantaian Gando, Kanto, Jeamni dan Insiden Sungai Shinano.

Di bawah pendudukan Jepang, juga terjadi perampasan tanah, yang kemudian diberikan kepada warga Jepang yang tinggal di Korea. Selain itu juga banyak perempuan Korea yang dijadikan budak seksual (*jugun ianfu*) dan menjadi bahkan menjadi ganjalan bagi hubungan Jepang-Korea sampai saat ini.

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dimana Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, dan sekaligus terjadi *vacum of power* di Korea yang tadinya dianeksasi Jepang. Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian membagi Korea menjadi 2 zona Pendudukan, yakni Korea Utara dan Korea Selatan antara tahun 1945-1948. Uni Soviet mendukung Korea Utara dengan sistem pemerintahan Komunis yang dipimpin Kim Il Sung, sedangkan Amerika Serikat mendukung Korea Selatan dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan dipimpin Syngman Rhee. Upaya reunifikasi dilakukan, namun mengalami kegagalan. Hubungan 2 Korea memburuk dan terjadi Perang Korea pada tahun 1948-1950.

B. Hubungan Jepang dan 2 Korea Pasca Perang Dunia II

Fase baru hubungan Jepang-Korea Selatan dimulai dengan normalisasi hubungan kedua negara dengan ditandatanganinya

Perjanjian Dasar Hubungan Jepang-Korea (Japan-Republic of Korea: Treaty on Basic Relations) pada 22 Juni 1965. Perjanjian yang terdiri dari 7 Pasal ini sepakat bahwa kedua negara akan menjalin hubungan bertetangga baik, atas dasar prinsip saling menghormati. (Collection, 1966)

Hubungan Jepang - Korea Selatan pada era Modern, yakni pasca normalisasi sampai saat ini sangat dinamis. Dalam bidang ekonomi terjadi investasi dan perdagangan bilateral, namun dalam bidang politik kedua negara masih mempunyai ganjalan terkait klaim tumpang tindih Pulau Dokdo (Jepang menyebutnya sebagai Pulau Takeshima), sensitifnya tradisi kunjungan Perdana Menteri ke Kuil Yashukuni serta interpretasi soal *jugun ianfu*.

Terkait *jugun ianfu*, sudah lama pemerintah Korea Selatan menuntut permintaan maaf oleh pemerintah Jepang. Sebetulnya pada Desember 2015 sudah disepakati bahwa Jepang akan mengakui dan meminta maaf, dan memberikan kompensasi pada para mantan *jugun ianfu*.

Permintaan maaf Jepang, terkait *jugun ianfu*, meskipun tidak secara spesifik menyebut *jugun ianfu* di Korea Selatan, namun pidato Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015 secara implisit mengakui adanya perlakuan yang tidak menghormati kehormatan perempuan, seperti tampak pada kutipan berikut :

"Kita akan mengukir di hati kita masa lalu, ketika martabat dan kehormatan banyak wanita terluka parah selama perang di abad ke-20. Atas refleksi ini, Jepang ingin menjadi negara

yang selalu berada di sisi hati wanita yang terluka seperti itu. Jepang akan memimpin dunia dalam menjadikan abad ke-21 sebagai era di mana hak asasi manusia perempuan tidak dilanggar. (August 14, 2015 Shinzo Abe, Prime Minister of Japan (Kantei.go.jp, 2015)

Namun demikian masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan dan masih menjadi isu sensitif antara lain tampak ketika pada tahun 2017 seniman Korea Selatan membuat patung *jugun ianfu* di depan Konsulat Jepang di Busan. Bagi pemerintah Jepang, hal ini dianggap tidak sesuai kesepakatan dan berakibat ditariknya 2 orang diplomat Jepang dari Korea Selatan.

Gambar V.2. Patung *Jugun Ianfu* yang Didirikan di Depan Konsulat Jenderal Jepang di Busan, Korea Selatan



Sumber: Park & Ahn (2015)

Terkait perbedaan interpretasi tradisi kunjungan pejabat Jepang, termasuk Perdana Menteri Jepang ke Kuil Yashukuni adalah

karena bagi Korea Selatan, (maupun China) tempat pemakaman para penjahat perang Dunia II, sementara bagi Jepang kunjungan ke Kuil tersebut untuk menghormati leluhur. Namun perbedaan interpretasi ini dianggap tidak memiliki sensitivitas terkait korban perang Dunia II.

Namun demikian, terkait masalah keamanan, baik Jepang maupun Korea Selatan mempunyai pandangan yang sama terkait persepsi ancaman pengayaan nuklir oleh Korea Utara, upaya hegemoni China, serta krusialnya perlindungan Amerika Serikat melalui aliansi keamanan Mutual Defense Treaty yang ditandatangani sejak 1 Oktober 1953.

Berbeda dengan hubungan Jepang- Korea Selatan, hubungan Jepang dengan Korea Utara lebih didasarkan pada pandangan Jepang bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara yang dipersepsi sebagai ancaman oleh Jepang. hal ini secara eksplisit tampak dalam *Japan Diplomatic Blue Book* maupun *Japan White Paper of Defense*. Sampai dengan tahun 1990an banyak terjadi penculikan warga Jepang oleh Korea Utara. Adapun persepsi Korea Utara sebagai ancaman, sampai saat ini adalah program nuklir dan uji coba rudal yang seringkali memasuki wilayah Jepang. Untuk ini Jepang melakukan pencegahan dengan program anti rudal yang sebagian besar merupakan kerjasama dengan Amerika Serikat, seperti *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), Aegis maupun kemampuan pertahanan aktif dan preventif.

Berbagai upaya penghentian pengayaan uranium untuk senjata nuklir oleh Korea Utara sebetulnya sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah melalui Six Party Talks yang beranggotakan Amerika Serikat, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, China dan Jepang, namun tidak menghasilkan kesepakatan dan terhenti pada tahun 2008.

Persoalan nuklir menjadi isu pelik bagi Jepang, karena komitmen Jepang dengan *Three Non-Nuclear Principles* sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Eisaku Sato di depan Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, pada 11 Desember 1967 bahwa Jepang tidak akan memiliki, tidak akan memproduksi dan tidak mengizinkan pengenalan senjata nuklir di wilayah Jepang, sejalan dengan Konstitusi Damai. (Japan M. o., *Three Non-Nuclear Principles*, 1967). Prinsip ini masih berlaku sampai sekarang sebagai bentuk komitmen Jepang terhadap anti senjata nuklir.

BAB VI

DINAMIKA HUBUNGAN JEPANG-RUSIA

... ketika dunia masih pulih dari pandemi, agresi Rusia terhadap Ukraina terjadi. Tidak ada negara atau wilayah di dunia yang dapat mengabaikan ini sebagai "masalah orang lain." Ini adalah situasi yang mengguncang fondasi tatanan internasional..(Pidato PM Kishida, The Five Pillars for Achieving PM Kishida's Realism Diplomacy for a New Era https://www.japan.go.jp/kizuna/2022/09/realism_diplomacy_for_a_new_era.html)

A. Hubungan Jepang-Rusia sebelum Perang Dunia II

Hubungan Rusia - Jepang yang secara geografis berdekatan, sangat dinamis, bahkan banyak diwarnai persaingan. Pada abad XIX persaingan antara Kekaisaran Jepang dan Rusia terkait hegemoni wilayah Asia Timur sudah terjadi. Persaingan terutama tampak pada perebutan kekuasaan atas wilayah wilayah Korea dan Manchuria. Manchuria sangat strategis bagi Jepang, karena secara ekonomis, kaya sumber daya alam, dan secara militer merupakan wilayah yang strategis karena dapat menjadi pintu masuk Jepang ke wilayah China maupun Rusia. Demikian pula bagi Rusia yang berusaha melakukan ekspansi terhadap Rusia.

Gambar VI.1. Peta Letak Manchuria



Sumber: Maptitude (2019)

Perang Jepang-Rusia berakhir dengan Perundingan Portsmouth, Maine dengan Theodore Roosevelt sebagai mediator. Konferensi Perdamaian berlangsung 5-9 Agustus 1905, dan menghasilkan Perjanjian Portsmouth 5 September 1905. Pada Perjanjian Portsmouth, Jepang memperoleh kembali Liaodong; memperoleh akses terhadap jalur kereta api Manchuria Selatan; pengakuan Karafuto (Sakhalin) diserahkan kembali kepada Jepang; dan Manchuria dikembalikan kepada China, dan pengakuan penguasaan Jepang atas Korea. (Britannica, 2022).

Perjanjian tersebut mengakhiri Perang Rusia- Jepang. Adapun dampak dari perang tersebut adalah Jepang semakin menjadi kekuatan di Asia Timur, sementara di Rusia terjadi tuntutan

untuk reformasi. Sampai dengan Perang Dunia I, hubungan Jepang-Rusia tetap tidak harmonis, terutama terkait Manchuria dan Korea.

Pada tahun 1912 di Rusia terjadi Revolusi Bolshevik, dan Rusia kemudian menjadi Uni Soviet. Hubungan Jepang-Uni Soviet tetap fluktuatif. Pada tahun 1930an Jepang semakin agresif dengan memperluas wilayah ke China dan Manchuria, di lain pihak Uni Soviet berupaya mengamankan perbatasannya.

Uni Soviet semakin percaya diri ketika menjelang perang Dunia II berhasil mengalahkan Jerman. Uni Soviet mendapat momentum ketika pada tahun 1945 Jepang menyerah pada Eropa dan kemudian Uni Soviet segera mengumumkan perang terhadap Jepang

Dilain pihak, konflik Jepang dengan Amerika Serikat dan Inggris semakin meningkat terkait beberapa perkembangan berikut. Bersama Jerman, dan Italia, Jepang tergabung dalam Poros Tripartit pada 27 September 1940. Pada tahun yang sama, Jepang memperluas wilayah kekuasaan di Asia tenggara dengan keberhasilan Jepang menduduki Indo Perancis (Vietnam).

Pada 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour yang memicu Pertempuran Midway dan memicu Perang Pasifik, yang akhirnya membawa kekalahan bagi Jepang. Pada tahun 1945 pasukan Amerika Serikat menginvasi Okinawa yang kemudian menjadi perang besar.

Pada tahun yang sama, di Potsdam, Jerman diadakan Konferensi dan menghasilkan Deklarasi Potsdam, 26 Juli 1945, ditandatangani Presiden Amerika Serikat, Harry S Truman, PM Inggris, Winston Churchill dan Pemimpin nasionalis China, Chiang Kaishek. Adapun poin utama dari *Potsdam Declaration* adalah menyerukan agar Jepang menyerah, dan akan menanggung konsekuensi, jika tidak segera menyerah. Terdapat 13 poin, diantaranya menjelaskan wilayah Jepang, pendudukan yang akan dilakukan Sekutu, serta agar tentara Jepang kembali ke kota asal dan hidup produktif (Library 2.-2. N., 2004)

Tidak adanya tanggapan dari Jepang sehingga pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Pada 8 Agustus 1945, Uni Soviet juga menyatakan perang pada Jepang. Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat, dan sejak saat itu Jepang kemudian berada di bawah kendali Sekutu, di bawah pimpinan Jendral MAcArthur.

Karena kekalahannya tersebut, terjadi pengaturan yang merugikan Jepang. Jepang kehilangan semua wilayah yang diperoleh setelah 1894. Sesuai Perjanjian Tripartit, poin 8, dengan merujuk pada *Cairo Declaration*, maka wilayah Jepang hanya mencakup Honshu, Hokkaido, Shikaku, Kyusu dan beberapa pulau kecil lain, yang ditentukan pihak Tripartit (Amerika Serikat, Inggris dan China). Terkait hubungannya dengan Uni Soviet, Kepulauan Kurile diduduki oleh Uni Soviet. Sedangkan Kepulauan Ryukyu,

termasuk Okinawa, dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan dikembalikan ke Jepang pada 1972. Sedangkan kepulauan Kurile yang terletak di utara Jepang, dan disebut Northern Territories oleh Jepang, terdiri dari Etorofu (Iturup), Kunashiri (Kunashir), Shikotan dan Hobamai, sampai saat ini masih dibawah Rusia dan masih dipersengketakan kedua negara yang belum terselesaikan.

Gambar V.I.2. Peta Northern Territories



Sumber: Ministry of Foreign Affairs of Japan, t.t.-a

Jepang dan Soviet melakukan upaya normalisasi hubungan pada Deklarasi Bersama 1956 yang berisi pemulihan hubungan diplomatik, negosiasi sengketa teritorial, dan pembebasan tawanan perang.

B. Hubungan Jepang-Rusia Pasca Perang Dunia II-sekarang

Pasca Perang Dunia II, Jepang menjalankan *Doctrine Yoshida* yakni untuk konsentrasi pada pembangunan ekonomi, sementara masalah keamanan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Jepang kemudian juga membentuk Aliansi Keamanan dengan Amerika Serikat pada 1952 yang diperpanjang tahun 1960, dan berlaku sampai sekarang.

Hubungan Jepang dengan Amerika Serikat menjadi semakin dekat pada era Perang Dingin. Penempatan pasukan Amerika Serikat di berbagai wilayah di Jepang, termasuk di Okinawa terbukti dapat menjadi 'corner stone' bagi Amerika Serikat ketika menghadapi konflik di kawasan Asia Timur, seperti halnya ketika Amerika Serikat melibatkan diri dalam Perang dua Korea. Di lain pihak, bagi Jepang, perlindungan keamanan dari Amerika Serikat menjadi jaminan dan deterens dalam menghadapi ancaman yang selama ini dipersepsikan oleh Jepang, yakni Korea Utara, China dan Rusia.

Pasca bubarnya Uni Soviet, Jepang dan Rusia berupaya melakukan normalisasi hubungan dengan ditandatanganinya *Tokyo Declaration on Japan-Russia Relations* yang ditandatangani PM

Jepang Morihiro Hosokawa dan Presiden Rusia, Boris N Yeltsin pada 13 Oktober 1993. Deklarasi yang terdiri dari enam pasal tersebut menyepakati bahwa Jepang dan Rusia akan menyebarkan nilai-nilai universal demokrasi, penegakan hukum dan menghormati Hak Azasi Manusia. (Affairs, Q&A ON JAPAN - U.S. RELATIONS Tokyo Declaration on Japan-Russia Relations, 1993)

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and Cuban Missile Crisis. *Source: The American Political Science Review*, 63(3), 689–718.
- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Longman.
- Asia Atlas. (t.t.). *Political Map of East Asia*. Diambil 27 November 2024, dari http://www.asia-atlas.com/east-asia.htm#google_vignette
- Bergsten, C. F. (1998). *Jepang dan Amerika Serikat dalam Perekonomian Dunia*. <https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/japan-and-united-states-world-economy>
- Britannica. (2024). *First Sino-Japanese War*. <https://www.britannica.com/event/First-Sino-Japanese-War-1894-1895>
- Buchholz, K. (2024, February 15). *Continental Shift: The Biggest Economies Over Time [Infographic]*. Forbes.Com. <https://www.forbes.com/sites/katharinabuchholz/2024/02/15/continental-shift-the-biggest-economies-over-time-infographic/>
- Defense, J. M. (n.d.). *National Defense Program Guidelines (NDPG) and Medium Term Defense Program (MTDP)*. Retrieved from <https://www.mod.go.jp/>: https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/guideline/index.html
- GRIPS, ". W., & Institute for Advanced Studies on Asia (IASA), T. U. (n.d.). *Treaty of Amity and Commerce between the United States of America and the Empire of Japan (Treaty of Amity and Commerce, Harris Treaty)*. Retrieved September 1, 2024, from <https://worldjpn.net>: <https://worldjpn.net/documents/texts/pw/18580729.T1E.html>

- Guvtavsson, J. (1999). How Should We Study Foreign Policy Change. *Cooperation and Conflict*, 34(1).
- Hoff, R. (n.d.). Next Steps for U.S.-Japan Security Cooperation. *Sasakawa USA Forum Issue*, 3. Retrieved September 7, 2024, from <https://www.spfusa.org/wp-content/uploads/2016/06/Hoff-Next-steps-US-Japan-security-cooperation.pdf>
- <https://www.id.emb-japan.go.jp>. (n.d.). *Ekonomi dan Industri Jepang*. Retrieved September 7, 2024, from https://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_15.html
- Japan, T. G. (2022, September 16). *www.japan.go.jp*. Retrieved from The Five Pillars for Achieving PM Kishida's Realism Diplomacy for a New Era: https://www.japan.go.jp/kizuna/2022/09/realism_diplomacy_for_a_new_era.html
- Kantei.go.jp. (2015, August 14). *Speeches and Statements by the Prime Minister*. Retrieved June 13, 2024, from https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201508/0814statement.html
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021, August 10). *Peningkatan Kerja Sama Indonesia - Jepang sebagai Mitra Strategis Terus Berlanjut*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36295/peningkatan-kerja-sama-indonesia-jepang-sebagai-mitra-strategisterus-berlanjut/0/berita>
- Library, Y. L.-L. (2008). *Japanese-American Diplomacy -Treaty of Kanagawa; March, 31, 1854*. Retrieved September 01, 2024, from <https://avalon.law.yale.edu>: https://avalon.law.yale.edu/19th_century/japan002.asp

(.mil), U. A. (1960, January 19). *Agreement Under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States of America and Japan, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan*. Retrieved from <https://www.usarj.army.mil/>:
https://www.usarj.army.mil/Portals/33/cmdstaffs/sja/doc/sofa_201601.pdf

Maptitude. (2019). *The Russo-Japanese war and peace, 1904-1905*. <https://maptitude1.tumblr.com/post/188259392832/the-russo-japanese-war-and-peace-1904-1905>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (t.t.-a). *Japanese Territory*. Diambil 27 November 2024, dari <https://www.mofa.go.jp/territory/index.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (n.d.-a). *Japan's Effort for A Free and Open Indo Pacific*". Retrieved September 7, 2024, from <https://www.mofa.go.jp/files/100056243.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (n.d.-b). *Japan's Role in the Maintenance of International Peace and Security*. Retrieved September 7, 2024, from https://www.mofa.go.jp/policy/un/pamph2000_archive/role.html

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (n.d.-c). *Measures taken by the Government of Japan against North Korea*. Japan - North Korea Relations. Retrieved September 7, 2024, from https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page4e_000377.html

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1997). *Japan's ODA Charter*. Official Development Assistance (ODA). <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1997/09.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023a). *Diplomatic Blue Book 2023*.

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2023/pdf/pdfs/2023_all.pdf

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023b). *G7 Hiroshima Summit*.
<https://www.us.emb-japan.go.jp/files/100502675.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023c). *Japan's Foreign Policy to Promote National and Global Interests*. Diplomatic Bluebook 2023.
[https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2023/en_html/chapter3/c030105.html#:~:text=\(1\)%20Japan%20DUN%20Relationship&text=Since%20joining%20the%20UN%20in,%2C%20development%2C%20and%20human%20rights](https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2023/en_html/chapter3/c030105.html#:~:text=(1)%20Japan%20DUN%20Relationship&text=Since%20joining%20the%20UN%20in,%2C%20development%2C%20and%20human%20rights).

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2024, January 24). *Hubungan Ekonomi Jepang-Tiongkok dan Perekonomian Tiongkok*.
https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m2/page23e_000652.html

Office, U. G. (1982, April 21). *Defense Burdensharing by Japan*. Retrieved from <https://www.gao.gov/>:
<https://www.gao.gov/products/118146>

Park, J.-M., & Ahn, E. (2015). *For Japan and South Korea, "comfort women" bronze may test resolve*.
<https://www.reuters.com/article/world/for-japan-and-south-korea-comfort-women-bronze-may-test-resolve-idUSKBN0UB0SH/>

Rosenau, J. (1974). *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. Sage Publication.

Snyder, R. C., Bruck, H. W., Sapin, B., Hudson, V. M., Chollet, D. H., & Goldgeier, J. M. (2002). *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*.

Wiedarti, P. (1992). Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jepang. *Cakrawala Pendidikan*, 2(XII).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.8903>

- Wikimedia Commons. (2011). *Treaty of Amity and Commerce between Japan and the United States 29 July 1858*.
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12765184>
- Wikipedia. (2013). *Diaoyu Dao*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_Kepulauan_Tiaoyutai#/media/Berkas:Senkaku_Diaoyu_Tiaoyu_Islands.png
- World Atlas. (t.t.). *Which Countries Are Part of East Asia?* Diambil 27 November 2024, dari <https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-are-part-of-east-asia.html>
- World Bank. (2022). *Military expenditure (% of GDP) - Japan*.
<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2022&locations=JP&start=1960&view=chart>
- World Bank. (2023). *Population 2022*.
https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/POP.pdf
- Xiao Liang, D. N. (2023, 2 2). *The proposed hike in Japan's military expenditure*. Retrieved August 18, 2024, from <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2023/proposed-hike-japans-military-expenditure>

Indeks

A

Air Self Defense Force, 41
Air Self Defense Force
(ASDF), 41
Aktor Rasional, 11
Allison, 11, 13, 14, 15, 29, 86
ASDF, 41
ASEAN+3, 31
Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), 31

B

Basic Policy for National
Defense, 42, 44
Belt and Road Initiatives, 45
Belt and Road Initiatives
(BRI), 45
BRI, 45
Burden Sharing, 53

C

Cairo Declaration, 82
Chiang Kaishek, 82
China Coast Guard (CCG),
67
Confidence Building
Measures, 43

D

*Declaration on Japan-Russia
Relations*, 85
Defensif, 5, 7

E

Eisaku Sato, 43, 78
era Hirohito, 37, 39
era Shigeru Yoshida, 40
Etorofu (Iturup), 83

F

FOIP, 34, 35, 45, 62
Free and Open Indo-Pacific,
34, 35
Free and Open Indo-Pacific
(FOIP), 34, 35

G

G7, 32, 88
Ground Self Defense Force,
41
Ground Self Defense Force
(GSDF), 41
GSDF, 41
Gustavsson, 8, 25, 27, 28

H

Hobamai, 83

J

Japan Defense Agency, 42

Japan Diplomatic Blue Book,
70, 77

Jepangisasi, 73

Jugun Ianfu, 76

K

Kaisar Hirohito, 37, 38, 51

Karafuto (Sakhalin), 80

Kebijakan Luar Negeri, 8, 16,
21, 24, 25, 28, 30

Kebijakan Sistemik, 25

Kishida, 45, 59, 68, 71, 79,
87

Kunashiri (Kunashir), 83

M

Manchuria, 9, 39, 65, 79, 80,
81

Maritime Self Defense Force,
41

Maritime Self Defense Force
(MSDF), 41

Military Build Up, 45, 68

Model Organisasi, 13, 26

Model Psikologis, 27

Model Rasional, 22, 26

Model Rasional-Instrumen,
26

MSDF, 41

Mutual Defense Treaty, 77

N

National Police Reserve, 41

National Police Reserve
(NPR), 41

Nobusuke Kishi, 53

Northern Territories, 83

NPR, 41

NSF, 41

O

ODA, 33, 88

Ofensif, 5, 7

Official Development
Assistance, 33, 88

Official Development
Assistance (ODA), 33, 88

P

Pasifis, 43

Pengambilan Kebijakan, 8,
16, 20, 21, 24, 25, 28

Pengambilan Keputusan, 5,
16

Perang Dunia II, 37, 40, 62,
65, 66, 72, 74, 79, 84

Perang Jepang-China I, 62

Perjanjian Kanagawa, 47, 48,
49

Perjanjian Maguan, 63

Perjanjian San Fransisco, 39,
52

Perjanjian Shimonoseki, 9,
63, 64

Pertempuran Midway, 81

Politik Birokrasi, 14

Proactive Contribution to
Peace, 45

Q

QUAD, 45

Quadilateral Security
Dialogue, 45

R

Revolusi Bolshevik, 81

Rosenau, 8, 21, 22, 24, 25,
29, 89

S

Sakoku, 47, 48

SDF, 41, 42, 44

Self Defense Force, 41

Self Defense Force (SDF), 41
Senkaku, 9, 62, 65, 66, 67,
68, 71

Shikotan, 83

Shinzo Abe, 45, 68, 75, 76

Showa, 37, 38, 51, 52

Six Party Talks, 78

Snyder, 8, 16, 17, 18, 19, 20,
29, 89

Supreme Commander for the
Allied Power, 39, 52

Supreme Commander for the
Allied Power (SCAP), 39

T

*Terminal High Altitude Area
Defense (THAAD)*, 77

The Greater East Asia co
Prosperity sphere, 51

The Three Non-Nuclear
Principles, 43

The US-Japan Security
Alliance, 52

W

Winston Churchill, 82

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI

Jepang



Erna Kurniawati, merupakan staf pengajar tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta. Telah menulis beberapa buku, diantaranya Pandemi COVID 19: Perspektif Hubungan Internasional, Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia-Rusia di Masa Pandemi Studi Kasus Ekpor Kopi, Diplomasi Publik Digital, Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial.



Sri Issundari adalah staf pengajar tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta. Telah menulis beberapa buku diantaranya: Panduan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Place Branding dalam Hubungan Internasional dan Menyingkap Potensi Wisata Perbatasan.



Sri Harjanti merupakan staf pengajar tetap di Jurusan Manajemen FEB UPN “Veteran” Yogyakarta. Telah menulis beberapa buku diantaranya: Pelayanan Prima bagi Front Liner, Bonsai Gaya dan Perawatan, Pemanfaatan dan Peningkatan Nilai Ekonomis Limbah Paralon, Matematika Ekonomi untuk Bisnis dan Manajemen